

13295.37

TINJAUAN PEREKONOMIAN Provinsi Bali 2022

12697.45



13295.37

TINJAUAN PEREKONOMIAN Provinsi Bali 2022

12697.45



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI BALI 2022

I S S N : 2477-7587

Nomor Publikasi : 51000.2322

Katalog : 9199011.51

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 78 halaman

Naskah : BPS Provinsi Bali

Penyunting : BPS Provinsi Bali

Disain Kover : BPS Provinsi Bali

Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Bali

Gambar : Freepik.com dan Unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Tinjauan Perekonomian Provinsi Bali 2022

Penanggung Jawab Umum:

Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si, M.M

Penanggung Jawab Teknis:

Ni Nyoman Jegeg Puspadewi, SST, M.M

Koordinator:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST., MSi.

Anggota:

I Gede Heprin Prayasta, SST., M.Si

Disain Kover:

I Dewa Gede Antara Putra, SST

Kontributor Data:

Tim Statistik Sosial

Tim Statistik Distribusi

Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

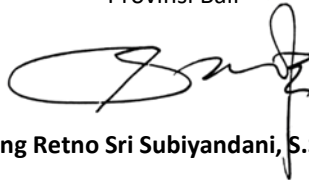
KATA PENGANTAR

Ekonomi Bali mulai menunjukkan trend positif, tercermin dari capaian indikator makro Provinsi Bali. Guncangan pandemi Covid-19 yang sebelumnya mengakibatkan beberapa indikator mengalami kontraksi, perlahan mulai bangkit meskipun belum masif seperti kondisi sebelum pandemi. Perumusan kebijakan makro membutuhkan adanya data pendukung arah kebijakan pembangunan khususnya di Provinsi Bali.

Publikasi “Tinjauan Perekonomian Provinsi Bali 2022” merupakan publikasi yang membahas kondisi makro ekonomi dan sosial ke dalam tiga bagian. Bagian pertama tentang perkembangan ekonomi dan inflasi. Bagian kedua mengenai perdagangan luar negeri dan pariwisata. Sedangkan bagian terakhir membahas pembangunan sosial dan pembangunan manusia.

Akhir kata, publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk siapa saja yang membacanya. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan pada edisi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Denpasar, Juni 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali



Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si, M.M.

DAFTAR ISI

Bab	Keterangan	Halaman
I	Perkembangan Ekonomi dan Inflasi	1
I.1	Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi	1
I.2	Perkembangan Inflasi dan IHK	25
II	Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata	29
II.1	Perdagangan Luar Negeri	29
II.2	Perkembangan Pariwisata	35
III	Pembangunan Sosial dan Pembangunan manusia	39
III.1	Perkembangan Kondisi Kemiskinan	39
III.2	Perkembangan Distribusi Pendapatan	44
III.3	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	52
III.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	59

DAFTAR TABEL

Bab	No	Keterangan	Halaman
I	I.1	Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2020 -2022	6
	I.2	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali, 2018-2022	10
	I.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018 - 2022	13
	I.4	Indikator PDRB Provinsi Bali, 2018 -2022	16
	I.5	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018 -2022 (Miliar Rp)	18
	I.6	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018-2022 (Miliar Rp)	19
	I.7	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018 -2022 (Persen)	21
	I.8	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018-2022 (Persen)	23
	I.9	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018 - 2022	24
	I.10	Laju Inflasi Singaraja dan Denpasar Menurut Kelompok Pengeluaran, 2022	28

II	II.1	Ekspor Bali Menurut Negara Tujuan, 2021 - 2022	31
	II.2	Ekspor Bali Menurut Komoditas Utama, 2022	32
	II.3	Impor Bali Menurut Negara Asal, 2022	33
	II.4	Impor Bali Menurut Komoditas, 2022	34
III	III.1	Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2012-2022	62
	III.2	Perkembangan IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020 - 2022	64
	III.3	Komponen Pembentuk IPM Bali, 2020 - 2022	66
	III.4	Umur Harapan Hidup (UHH) Bali, 2012 - 2022	67
	III.5	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali Menurut Kabupaten/kota, 2020 – 2022	70
	III.6	Rata-rata Lama Sekolah/ <i>Mean Years of Schooling</i> (MYS) Bali Menurut Kabupaten/kota, 2020 – 2022	73
	III.7	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten /kota, 2020 – 2022	76

DAFTAR GRAFIK

Bab	No	Keterangan	Halaman
I	I.1	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Bali, 2018 – 2022 (Persen)	2
	I.2	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Bali, 2018 - 2022 (Persen)	4
	I.3	Distribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2022 (Persen)	5
	I.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional, 2018 - 2022 (Persen)	7
	I.5	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2022 (Persen)	8
	I.6	Rata – Rata Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018 - 2022 (Persen)	9
	I.7	Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2022 (Persen)	11
	I.8	PDRB Per Kapita Provinsi Bali, 2018 – 2022 (juta rupiah)	15
	I.9	Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut	20

		Pengeluaran Provinsi Bali, 2018 – 2022 (Triliun Rupiah)	
	I.10	Inflasi Denpasar, Singaraja dan Nasional, 2011 - 2022	26
	I.11	Inflasi Bulanan Denpasar, Singaraja dan Nasional, 2020- 2022	26
II	II.1	Perkembangan Ekspor, Impor dan Net Ekspor Bali, 1990 - 2022	30
	II.2	Jumlah Kunjungan Wisman ke Bali dan Pertumbuhannya, 1969 - 2022	36
	II.3	Perkembangan TPK Hotel Berbintang Menurut Bulan, 2020 - 2022	37
	II.4	Perkembangan Rata-rata Lama Menginap Hotel Berbintang Menurut Bulan, 2020 - 2022	38
III	III.1	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali kondisi Maret (ribu jiwa), 2012 - 2022	41
	III.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali kondisi Maret, 2012 - 2022	42
	III.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali kondisi Maret, 2012 - 2022	43
	III.4	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali kondisi Maret, 2012 - 2022	44
	III.5	Distribusi Pendapatan di Bali menurut Kriteria Bank Dunia, 2018-2022	46

III.6	Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Bali menurut Kriteria Bank Dunia, 2022	47
III.7	Koefisien Gini Bali dan Nasional, 2008-2022	48
III.8	Distribusi Konsumsi Makanan dan Konsumsi Per Kapita (juta rupiah) menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2021 – 2022	50
III.9	Pengeluaran Makanan Menurut Komoditas dan Golongan Pengeluaran Penduduk Bali (persen), 2022	51
III.10	UMR Kabupaten/Kota dan UMP Provinsi Bali, 2021 – 2022 (rupiah)	54
III.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Bali, Nasional dan Beberapa Provinsi, 2001 - 2022	55
III.12	TPAK Bali Bulan Agustus dan Februari, 2012 - 2022	57
III.13	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Bali, 2022	58
III.14	Proporsi Pekerja Menurut Sektor, 2022	59
III.15	Perkembangan IPM Bali, 2012 - 2022	61
III.16	Pertumbuhan IPM dan Ekonomi Bali, 2012- 2022	62
III.17	Pergerakan Status Capaian IPM Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2012 - 2022	65

III.18	Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Bali dan Pertumbuhannya, 2022	68
III.19	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali, 2012 – 2022	69
III.20	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bali dan Pertumbuhannya, 2022	71
III.21	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali, 2012 - 2022 (Rp 000)	74
III.22	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota dan Pertumbuhannya, 2022	75
III.23	IPM Beberapa Provinsi di wilayah JABALNUSRA, 2022	77

BAB I

Perkembangan Ekonomi dan Inflasi

I.1 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi

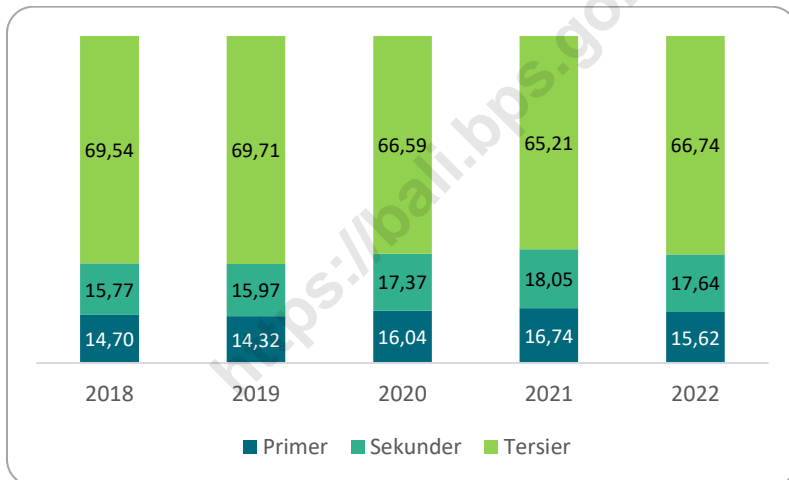
Secara umum, perekonomian Bali diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan hasil estimasi total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi. Dalam mencerminkan besaran absolut perekonomian pada periode waktu tertentu, PDRB disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Sedangkan untuk mengukur pertumbuhan perekonomian dari waktu ke waktu, PDRB disajikan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2022, Perekonomian Bali Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp.219,80 triliun, sementara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp.143,87 triliun. Besaran ekonomi Bali tersebut memberi sumbangan 1,30 persen terhadap perekonomian Nasional pada tahun 2022.

Berdasarkan kategori lapangan usaha, peranan sektor tersier terhadap perekonomian Bali masih tercatat mendominasi dibandingkan dengan dua sektor lainnya (primer dan sekunder). Pada tahun 2022, sektor tersier memberikan *share* sebesar 66,74 persen. Sementara sektor sekunder dan primer masing-masing sebesar 15,62 persen dan 17,64 persen. Dominasi sektor tersier juga terlihat selama lima tahun terakhir, kontribusinya mencapai dua kali lipat lebih dari total kontribusi sektor lainnya. Namun selama dua tahun (2020 – 2021), kontribusi sektor tersier yang pada tahun-tahun sebelumnya cenderung meningkat, sekarang

mengalami penurunan. Adanya wabah pandemi Covid-19 telah memukul telak aktivitas perekonomian jasa-jasa sehingga kontribusi sektor tersier menurun dari 69,71 persen (2019) menjadi 65,21 persen (2021). Besaran kontribusi pada tahun 2021 tercatat lebih kecil dibanding kondisi tahun 2018 yang kala itu tercatat sebesar 69,54 persen.

Grafik I.1

Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam PDRB Bali, 2018 – 2022 (Persen)



Pemulihan kontribusi sektor tersier mulai terlihat pada tahun 2022 dengan peningkatan kontribusi sebesar 1,53 persen poin setelah sebelumnya pada tahun 2020 menurun 3,12 persen poin dan tahun 2021 kembali menurun sedalam 1,38 persen poin. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Bali perlahan mulai bergerak meskipun belum semasif kondisi sebelum pandemi.

Sejalan dengan kondisi sebelumnya, penurunan sektor tersier yang terjadi di tahun 2021 mengakibatkan kontribusi sektor primer memiliki ruang untuk mengembang. Setelah sebelumnya kontribusi sektor primer selalu menurun (2018-2019), akhirnya di tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 1,74 poin dan tahun 2020-2021 kembali meningkat 0,63 poin. Hal ini diduga dari perubahan kelesuan mata pencaharian di sektor pariwisata yang lebih bersifat formal menuju pekerjaan yang cenderung informal di sektor primer. Meski sebagian besar kontribusi sektor perekonomian mengalami pergolakan, namun penjabaran secara lebih rinci per lapangan usaha selama periode tahun 2018 – 2022 masih menunjukkan struktur perekonomian Bali yang tidak banyak mengalami perubahan.

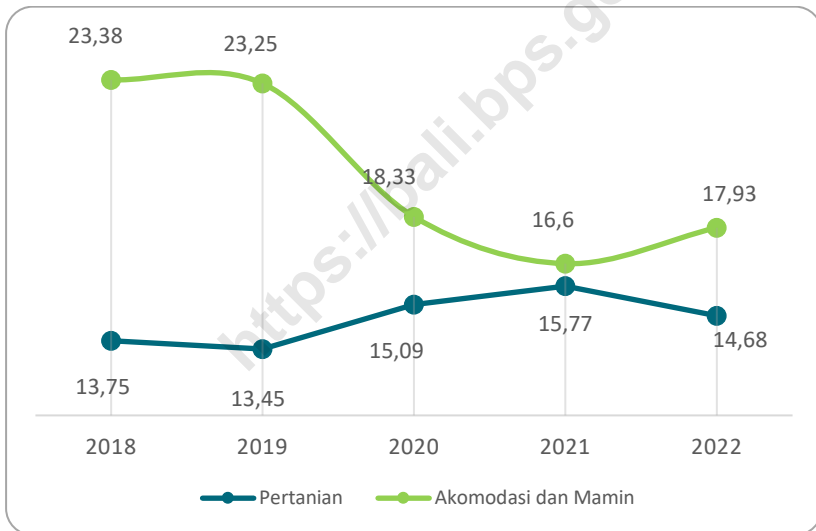
Lapangan usaha yang memiliki *share* paling besar terhadap perekonomian Bali adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum masih mendominasi perekonomian Bali di tahun 2022, dengan catatan besaran kontribusi mencapai 17,93 persen, posisi ini meningkat dari tahun 2021 yang tercatat sebesar 16,6 persen. Indikator kepariwisataan juga menunjukkan catatan yang menggembirakan, seperti jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat signifikan yaitu dari 51 kunjungan pada tahun 2021 menjadi 2.155.747 kunjungan di tahun 2022.

Kondisi sebaliknya terjadi pada lapangan usaha sebagai kontributor terbesar kedua yaitu lapangan usaha pertanian. Kontribusi lapangan usaha pertanian tercatat menurun dari sebesar 15,71 persen

tahun 2021 menjadi 14,68 persen pada tahun 2022, atau mengalami penurunan 1,03 poin. Pada tahun 2019-2021 *share* kategori pertanian tercatat mengalami peningkatan, pada masa pemulihan ekonomi ternyata kontribusi pertanian kembali menurun.

Grafik 1.2

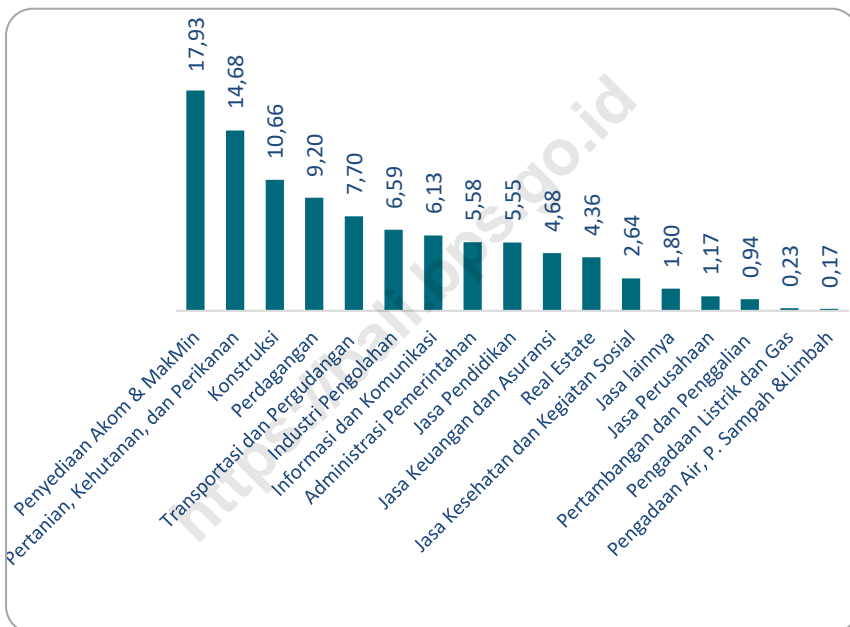
Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum Terhadap PDRB Bali, 2018 – 2022 (Persen)



Lapangan usaha terbesar ketiga penyumbang perekonomian Bali adalah lapangan usaha konstruksi. Sumbangan lapangan usaha tersebut tercatat sebesar 10,06 persen pada tahun 2022. Sementara itu, tiga kategori dengan kontribusi paling kecil adalah pertambangan dan

penggalian (0,94 persen); pengadaan listrik dan gas (0,23 persen); serta pengadaan air dan pengelolaan sampah (0,17 persen).

Grafik 1.3
Distribusi PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha,
2022 (Persen)



Tabel I.1
Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB Bali, 2020 -2022

Lapangan Usaha		2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,09	15,77	14,68
B	Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,97	0,94
C	Industri Pengolahan	6,44	6,68	6,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,21	0,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah DLL	0,19	0,19	0,17
F	Konstruksi	10,52	10,97	10,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	9,04	9,22	9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	6,95	5,64	7,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,33	16,60	17,93
J	Informasi dan Komunikasi	6,36	6,73	6,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,25	4,39	4,68
L	Real Estat	4,43	4,58	4,36
M,N	Jasa Perusahaan	1,15	1,15	1,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	5,89	6,21	5,58
P	Jasa Pendidikan	5,88	6,11	5,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,58	2,83	2,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,74	1,76	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

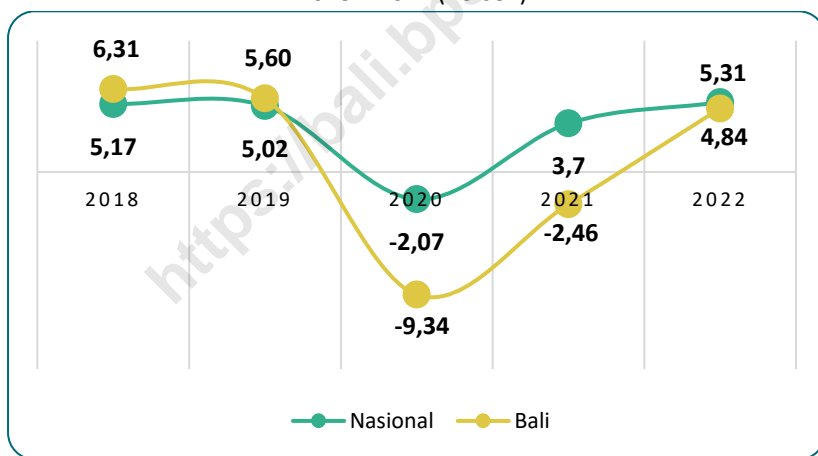
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika sebelumnya dibahas mengenai *share* atau biasa disebut kontribusi ekonomi, berikutnya adalah mengenai laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga konstan secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah atau wilayah. Pada tahun 2022

pertumbuhan ekonomi Bali tercatat mengalami peningkatan hingga 4,84 persen. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat kontraksi sedalam 2,46 persen. Meskipun pemulihan ekonomi sudah jelas terlihat arahnya, namun pertumbuhan perekonomian Bali masih tercatat lebih rendah dari pertumbuhan sebelum Covid-19 dan dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat tumbuh hingga 5,31 persen.

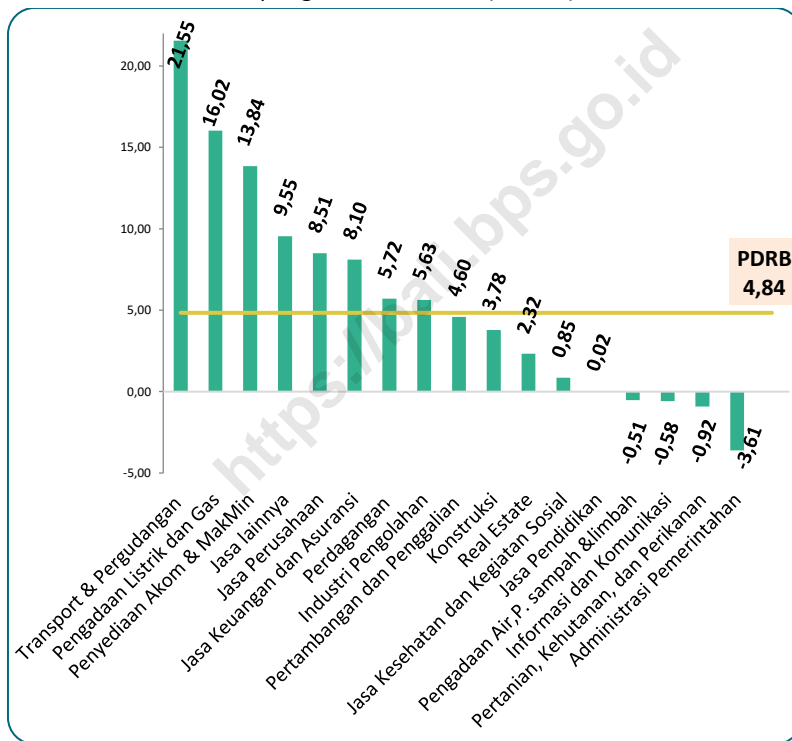
Grafik I.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional
2018 – 2022 (Persen)



Dilihat lebih rinci menurut lapangan usaha, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial tercatat kontraksi paling dalam hingga 3,61 persen. Pertumbuhan terendah kedua tercatat pada lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan dengan

laju pertumbuhan sedalam 0,92 persen, disusul oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tercatat tumbuh terkontraksi 0,58 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik I.5**.

Grafik I.5
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut
Lapangan Usaha, 2022 (Persen)

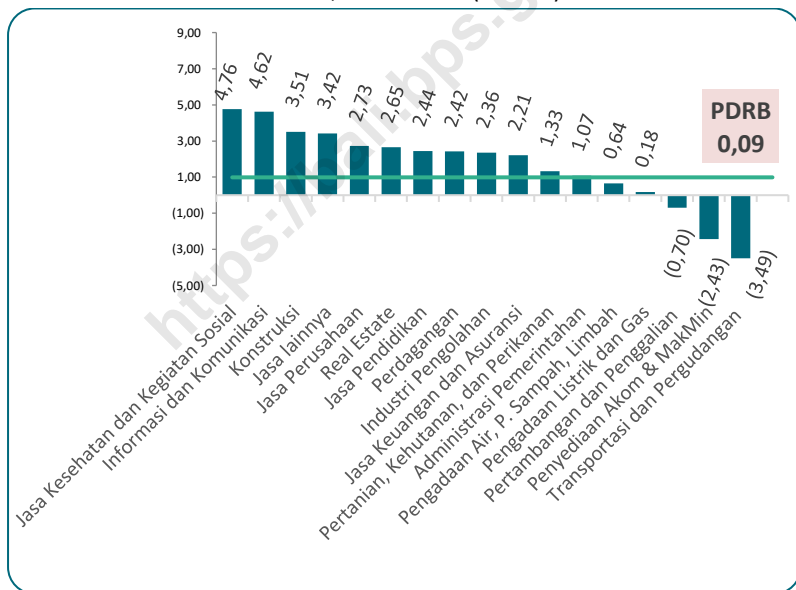


Jika dilihat secara rata-rata, maka rata-rata pertumbuhan terendah per tahun dalam kurun waktu 2018-2022 tercatat pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yang terkontraksi sedalam 3,49 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah kedua ditempati oleh

lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tercatat mengalami kontraksi sedalam 2,43 persen. Pertumbuhan dan penggalian sebagai lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan terendah selanjutnya, yakni terkontraksi 0,70 persen. Sementara itu, jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di periode waktu lima tahun terakhir, yaitu sebesar 4,76 persen.

Grafik I.6

Rata – Rata Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2018–2022 (Persen)



Tabel I.2
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali
2018-2022

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,73	3,46	-0,98	0,33	-0,92	1,33
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,65	-1,23	-4,28	0,07	4,60	-0,70
C	Industri Pengolahan	5,69	6,79	-6,41	0,08	5,63	2,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,94	4,52	-16,49	-5,08	16,02	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,03	6,17	-0,51	-3,96	-0,51	0,64
F	Konstruksi	9,76	6,87	-2,75	-0,08	3,78	3,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	7,35	-7,05	-1,45	5,72	2,42
H	Transportasi dan Pergudangan	6,13	4,63	-32,09	-17,68	21,55	-3,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,70	5,03	-27,50	-10,24	13,84	-2,43
J	Informasi dan Komunikasi	7,74	7,06	6,16	2,74	-0,58	4,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	8,78	-4,48	-3,29	8,10	2,21
L	Real Estat	4,07	5,87	0,48	0,49	2,32	2,65
M,N	Jasa Perusahaan	7,79	4,61	-4,08	-3,20	8,51	2,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,19	4,50	-0,38	0,65	-3,61	1,07
P	Jasa Pendidikan	7,38	4,86	-0,83	0,79	0,02	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	5,97	2,84	5,54	0,85	4,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,37	7,61	-6,45	-2,00	9,55	3,42
Produk Domestik Regional Bruto		6,31	5,60	-9,34	-2,46	4,84	0,99

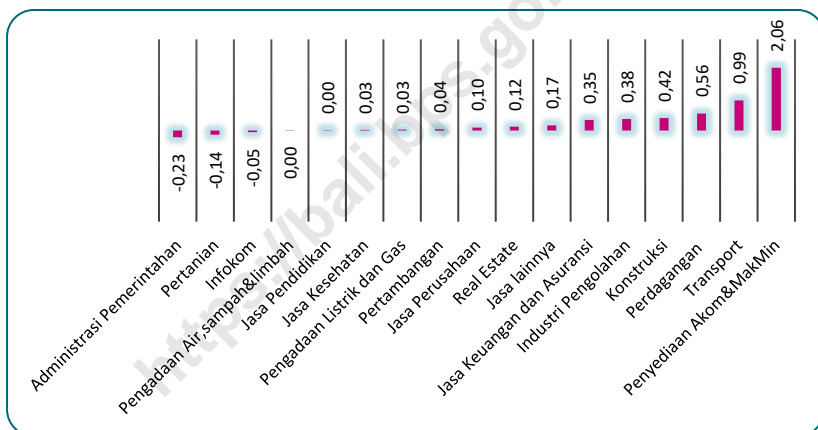
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu lapangan usaha terhadap total perekonomian Bali adalah Sumber Pertumbuhan (*Source of Growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu lapangan usaha terhadap pertumbuhan yang dicapai suatu wilayah.

Grafik 1.7

Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha, 2022
(Persen)



Pada **Grafik 1.7** dapat dilihat peranan seluruh lapangan usaha terhadap pertumbuhan PDRB Bali. Pada tahun 2022, penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan utama yakni sebesar 2,06 persen. Diikuti lapangan usaha transportasi dan perdagangan serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada urutan selanjutnya dengan sumbangan masing-masing sebesar 0,99 persen dan 0,56 persen. Sementara itu, tiga lapangan usaha tercatat menjadi penahan

laju perekonomian Bali yaitu lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pertanian kehutanan, dan perikanan, serta informasi dan komunikasi. Berakhirnya kebijakan *work from home* serta *school from home*, mengakibatkan pertanian sebagai penyangga guncangan ekonomi mengalami penurunan peranan pada laju pertumbuhan ekonomi Bali, begitu pula dengan turunnya realisasi anggaran pemerintah sekiranya menjadi penahan laju pertumbuhan pada tahun 2022.

Dalam kurun waktu tahun 2018-2022, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang paling dominan. Sebagai lapangan usaha dengan sumbangan kontribusi tertinggi kedua pada tahun 2022, besaran sumbangan lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian mengalami tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Kondisi yang sejalan juga terlihat dari lapangan usaha perdagangan. Dalam periode yang sama (2018-2022), perkembangan kontribusi lapangan usaha ini relatif bervariasi. Sementara itu, lapangan usaha real estat serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi dua lapangan usaha yang selalu menjadi sumber pertumbuhan positif terhadap perekonomian Bali selama lima tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel I.3**.

Tabel I.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha,
2018 - 2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,65	0,47	-0,13	0,05	-0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,03	-0,01	-0,04	0,00	0,04
C	Industri Pengolahan	0,36	0,43	-0,41	0,01	0,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01	-0,03	-0,01	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00
F	Konstruksi	0,94	0,68	-0,28	-0,01	0,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,69	0,68	-0,66	-0,14	0,56
H	Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,34	-2,34	-0,97	0,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,03	-5,57	-1,66	2,06
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,50	0,44	0,23	-0,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,08	0,35	-0,19	-0,14	0,35
L	Real Estat	0,19	0,27	0,02	0,02	0,12
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,05	-0,05	-0,04	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,24	0,25	-0,02	0,04	-0,23
P	Jasa Pendidikan	0,41	0,27	-0,05	0,05	0,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,20	0,14	0,07	0,15	0,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,13	-0,11	-0,03	0,17
Produk Domestik Regional Bruto		6,31	5,60	-9,34	-2,46	4,84

* Angka sementara

** Angka sementara

Jika nilai PDRB Bali dibagi dengan jumlah penduduk Bali, maka tergambar tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan atau diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah atau wilayah bersangkutan. Indikator ini disebut dengan PDRB per kapita.

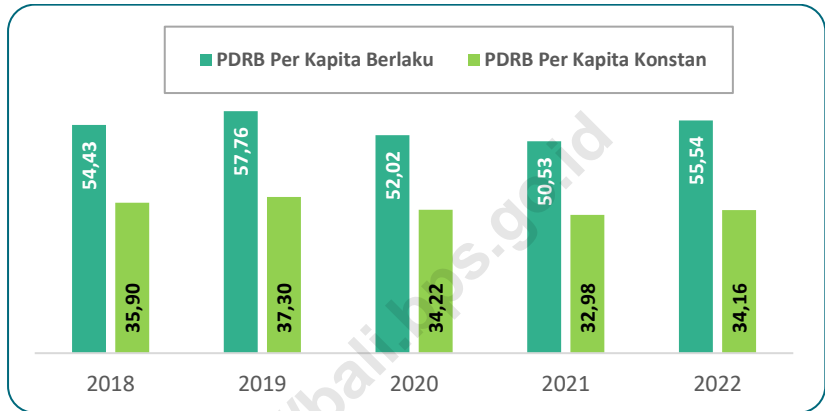
Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera. Kendati demikian, perlu diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah atau wilayah bersangkutan. Namun secara umum, data ini tetap berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah atau wilayah maupun antar tahun.

PDRB per kapita Bali atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp.55,54 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Bali mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp.55,54 juta selama tahun 2022. Jumlah ini meningkat sebanyak Rp5,01 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, maka PDRB per kapita Bali yang terbentuk pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp34,16 juta. Nilai ini meningkat Rp1,18 juta atau tumbuh 3,56 persen. Artinya, dengan mengesampingkan faktor inflasi harga

yang terjadi selama setahun terakhir, nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk Bali secara rata-rata meningkat 3,56 persen.

Grafik I.8

PDRB Per Kapita Provinsi Bali, 2018 – 2022 (Juta Rupiah)



PDRB per kapita dapat pula digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah hasil pembangunan yang dilakukan selama ini secara umum telah dapat meningkatkan “kue perekonomian” secara makro. Dengan kata lain, dapat dilihat bagaimana penciptaan nilai tambah yang terjadi akibat proses pembangunan bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk di Bali. Nilai PDRB per kapita Bali yang meningkat menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang telah dilakukan di Bali mampu menciptakan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk Bali.

Tabel I.4
Indikator PDRB Provinsi Bali, 2018 - 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	233.636,77	251.934,10	224.225,72	220.467,45	245.233,24
2	PDRB Harga Konstan 2010 (Milyar Rp)	154.072,66	162.693,36	147.498,94	143.864,97	150.821,44
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (000 Org)	4.292,15	4.362,05	4.310,75	4.362,74	4.415,06
4	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rp)	54,43	57,76	52,02	50,53	55,54
5	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rp)	35,90	37,30	34,22	32,98	34,16

Keterangan:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika pada bagian sebelumnya uraian disampaikan menggunakan kerangka pengukuran PDRB menurut kategori lapangan usaha, maka selanjutnya akan diulas melalui sudut pandang konsumsi atau penggunaannya. Jika sebelumnya PDRB dilihat dari sisi “dari mana volume ekonomi dihasilkan”, maka selanjutnya PDRB akan dilihat dari arah “untuk apa saja volume ekonomi tersebut digunakan”. Dilihat dari sisi penggunaan, perubahan struktur ekonomi Bali tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan

struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan atau penurunan perdagangan internasional.

PDRB menurut pengeluaran, terdiri dari beberapa komponen pengeluaran. Komponen-komponen tersebut antara lain: konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir lembaga non profit (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. Semua komponen tersebut, memiliki kontribusi untuk membentuk total PDRB pengeluaran.

Data menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Bali digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori) dan sebagian lainnya untuk impor. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Kondisi perekonomian Bali akhirnya mengalami pemulihan pada tahun 2022, setelah sempat terpuruk pada tahun 2010-2011. Wabah pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang segi kesehatan namun turut memukul sendi-sendi perekonomian. Dari sisi pengeluaran, penurunan perekonomian yang terjadi diakibatkan oleh adanya perubahan harga maupun perubahan volume. Baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sama-sama menunjukkan penurunan pada tahun sebelumnya perlahan mulai bangkit.

Tabel I.5

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018-2022 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	111.762,44	121.140,03	119.957,69	122.107,15	133.351,88
2. Konsumsi LNPR	2.764,03	3.163,69	3.055,82	3.185,25	3.716,57
3. Konsumsi Pemerintah	24.531,44	26.712,14	27.338,43	26.606,78	26.907,49
4. PMTB	71.936,11	74.886,65	67.493,63	67.166,54	72.801,51
5. Perubahan Inventori	691,27	589,96	455,78	511,17	567,05
6. Ekspor Luar Negeri	96.781,56	97.203,75	24.877,04	7.425,43	47.271,82
7. Impor Luar Negeri	26.079,89	22.692,69	4.777,88	863,88	6.335,55
8. Net Ekspor Antar Daerah	-48.750,19	-49.069,43	-14.174,80	-5.670,99	-33.047,54
PDRB	233.636,77	251.934,10	224.225,72	220.467,45	245.233,24

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Harga cukup terjaga dengan masih tercatatnya perkembangan harga yang menunjukkan inflasi baik di Kota Denpasar (6,44 persen) maupun Kota Singaraja (4,63 persen), tercermin dari nilai PDRB ADHB tahun 2022 Bali perlahan mulai meningkat dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, besaran PDRB ADHB mencapai Rp245,23 triliun, atau lebih tinggi 11,23 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat Rp220,47 triliun. Dengan demikian, perubahan harga yang mengalami peningkatan selama

setahun terakhir ternyata mampu menarik besaran absolut perekonomian akibat perubahan volume yang juga meningkat.

Tabel I.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Bali, 2018 - 2022 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	80.025,34	84.688,99	81.601,58	81.726,57	85.027,85
2. Konsumsi LNPRT	1.864,02	2.082,68	2.000,72	2.060,65	2.288,63
3. Konsumsi Pemerintah	15.131,40	16.438,66	16.453,63	16.197,94	15.995,35
4. PMTB	51.076,08	52.755,13	46.598,91	44.547,84	45.712,96
5. Perubahan Inventori	246,51	229,51	210,49	268,99	289,15
6. Ekspor Luar Negeri	59.447,66	59.187,15	14.121,60	4.340,07	28.408,26
7. Impor Luar Negeri	16.568,49	14.315,44	3.123,42	549,12	3.842,78
8. Net Ekspor Antar Daerah	-37.149,86	-38.373,32	-10.364,55	-4.727,96	-23.057,98
PDRB	154.072,66	162.693,36	147.498,94	143.864,97	150.821,44

Keterangan:

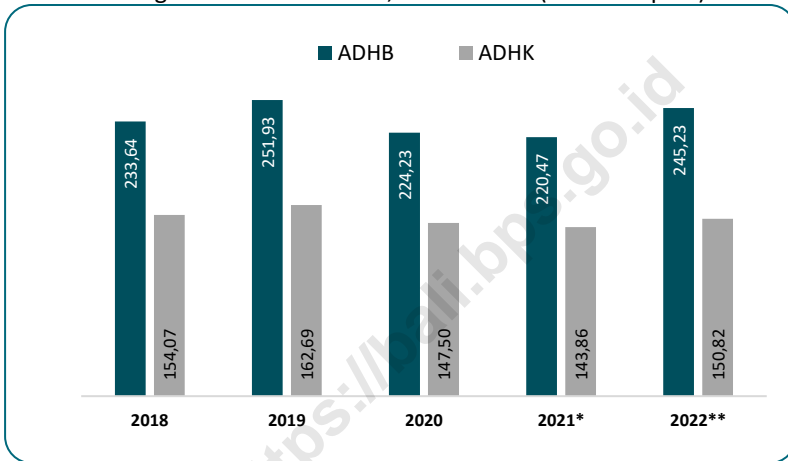
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Untuk melihat perubahan PDRB secara kuantitas atau melihat perubahan volumenya, maka PDRB juga dinilai atas dasar harga konstan tahun 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan ini maka faktor pengaruh

perubahan harga dapat dihilangkan, sehingga diperoleh gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja.

Grafik I.9
Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran Provinsi Bali, 2018 – 2022 (Triliun Rupiah)



Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB komponen pengeluaran ADHK atau PDRB riil menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara nyata, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seperti halnya PDRB secara nominal, PDRB secara riil di Bali juga mengalami peningkatan berturut-turut selama tahun 2018-2019 namun mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021 akibat dampak wabah pandemi Covid-19 sebelum akhirnya perlahan bangkit pada tahun 2022.

Tabel I.7
Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018 - 2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	47,84	48,08	53,50	55,39	54,38
2. Konsumsi LNPRT	1,18	1,26	1,36	1,44	1,52
3. Konsumsi Pemerintah	10,50	10,60	12,19	12,07	10,97
4. PMTB	30,79	29,72	30,10	30,47	29,69
5. Perubahan Inventori	0,30	0,23	0,20	0,23	0,23
6. Ekspor	41,42	38,58	11,09	3,37	19,28
7. Impor	11,16	9,01	2,13	0,39	2,58
8. Net Ekspor Antar Daerah	-20,87	-19,48	-6,32	-2,57	-13,48
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pada **tabel I.7** di atas, dapat dilihat bahwa komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang PDRB terbesar (setengah lebih dari total PDRB). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar produk (barang dan jasa) di Provinsi Bali masih digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Kontribusi komponen konsumsi rumah tangga selama lima tahun terakhir berkisar antara 47,84 persen hingga 55,39 persen.

Kontribusi terbesar selanjutnya dan tergolong stabil selama lima tahun terakhir adalah komponen pengeluaran untuk modal (PMTB). Komponen ini memberikan *share* terhadap perekonomian Bali pada kisaran

30 persen. Meski situasi tahun 2022 merupakan momentum pemulihan pasca badai pandemi Covid-19, nampaknya pembangunan infrastruktur masih terus berjalan. Beberapa proyek besar yang terjadi di tahun 2021 hingga 2022 di antaranya pembangunan jalan *Short Cut* Singaraja-Mengwitani, normalisasi aliran Tukad Unda Klungkung, pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Buleleng, serta pembangunan pelabuhan Segitiga Sanur-Nusa Penida-Nusa Ceningan.

Sementara itu, komponen konsumsi pemerintah (PKP) memiliki kontribusi di kisaran 10 persen. Perkembangan kontribusi komponen tersebut juga relatif stagnan selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran investasi dan peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidaklah terlalu besar hingga bisa mengubah struktur kontribusi PDRB menurut pengeluaran.

Hal menarik selama lima tahun terakhir adalah perkembangan kontribusi ekspor yang tercatat mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2018, kontribusi ekspor tercatat sebesar 41,42 persen kemudian terus merosot di tahun 2021 hanya sebesar 3,15 persen dan perlahan bangkit menjadi 19,28 persen di tahun 2022. Kontribusi ekspor sempat mengalami penurunan cukup dalam namun akhirnya kembali menggeliat seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kembali dibukanya akses lalu lintas kegiatan distribusi di sektor perdagangan serta meningkat tajamnya wisman yang datang ke Bali setelah pandemi Covid-19 mereda membuat ekspor barang maupun jasa kembali pulih pada tahun 2022.

Di sisi lain, Bali juga melakukan impor guna memenuhi permintaan domestik. Pada tahun 2018 sampai 2019, besaran permintaan domestik yang dipenuhi dari impor berada pada kisaran 10 persen. Besaran impor menurun pada tahun 2020-2021 dan kembali meningkat menjadi 2,58 persen pada tahun 2022. Sementara itu, perbandingan impor dengan ekspor juga menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai ekspor selalu lebih tinggi dari nilai impor, atau dengan kata lain, neraca perdagangan luar negeri Bali selalu menunjukkan posisi “surplus”.

Tabel I.8
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018 - 2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,03	5,83	-3,65	0,15	4,04
2. Konsumsi LNPRT	6,71	11,73	-3,94	3,00	11,06
3. Konsumsi Pemerintah	5,55	8,64	0,09	-1,55	-1,25
4. PMTB	9,55	3,29	-11,67	-4,40	2,62
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	6,11	-0,44	-76,14	-69,27	554,56
7. Impor	24,41	-13,60	-78,18	-82,42	599,81
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
Total PDRB	6,31	5,60	-9,34	-2,46	4,84

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, kinerja pembangunan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2022 belum menunjukkan hasil yang gemilang

dibandingkan periode normal sebelum pandemi Covid-19 melanda. Selama periode tahun 2018-2019, pertumbuhan ekonomi Bali berada pada kisaran 5-6 persen. Namun di tahun 2020, perekonomian merosot tajam hingga kontraksi atau tumbuh negatif sedalam -9,34 persen dan di tahun 2021 kembali mengalami kontraksi hingga -2,46 persen sebelum akhirnya bangkit pada level 4,84 persen di tahun 2022. Meskipun terjadi pemulihan ekonomi, perlu digarisbawahi bahwa performa ekonomi Bali belum sepenuhnya pulih seperti masa sebelum pandemi.

Sementara itu, tingkat perubahan harga digambarkan melalui indeks implisit PDRB. Selama kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2022, indeks implisit menunjukkan adanya kenaikan harga dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, indeks implisit PDRB sebesar 162,60 mengalami peningkatan dari indeks implisit PDRB pada tahun 2018 yang sebesar 151,64.

Tabel I.9
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Bali, 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	139,66	143,04	147,00	149,41	156,83
2. Konsumsi LNPR	148,28	151,90	152,74	154,58	162,39
3. Konsumsi Pemerintah	162,12	162,50	166,15	164,26	168,22
4. PMTB	140,84	141,95	144,84	150,77	159,26
5. Perubahan Inventori	280,42	257,05	216,53	190,03	196,11
6. Ekspor	162,80	164,23	176,16	171,09	166,40
7. Impor	157,41	158,52	152,97	157,32	164,87
8. Net Ekspor Antar Daerah	131,23	127,87	136,76	119,95	143,32
Total PDRB	151,64	154,85	152,02	153,25	162,60

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

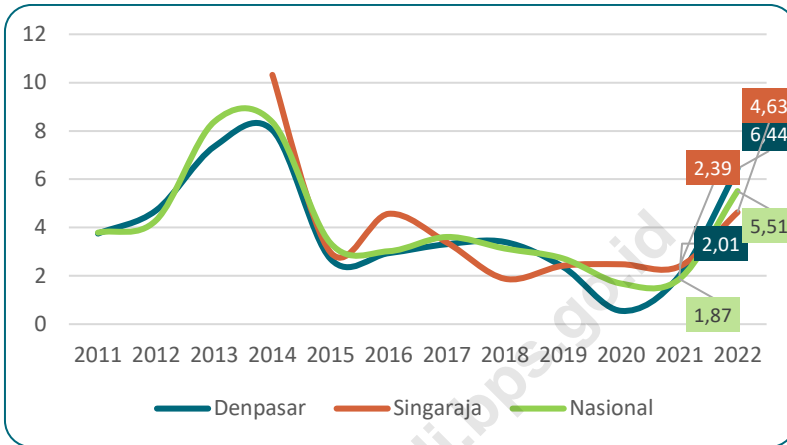
I.2 Perkembangan Inflasi dan IHK

Salah satu indikator ekonomi yang kiranya perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual bisa dikatakan sebagai tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, yang disebut dengan indeks harga konsumen (IHK).

Laju inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah. Selama kurun waktu satu dekade terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 perhitungan inflasi menggunakan tiga tahun dasar yaitu tahun dasar 2007 untuk inflasi tahun 2011-2013; tahun dasar 2012 untuk inflasi tahun 2014 – 2019; serta tahun dasar 2018 untuk inflasi tahun 2020-sekarang. Sejak tahun 2014 pengukuran inflasi di Bali diperluas menjadi dua kota yakni Kota Denpasar dan Singaraja.

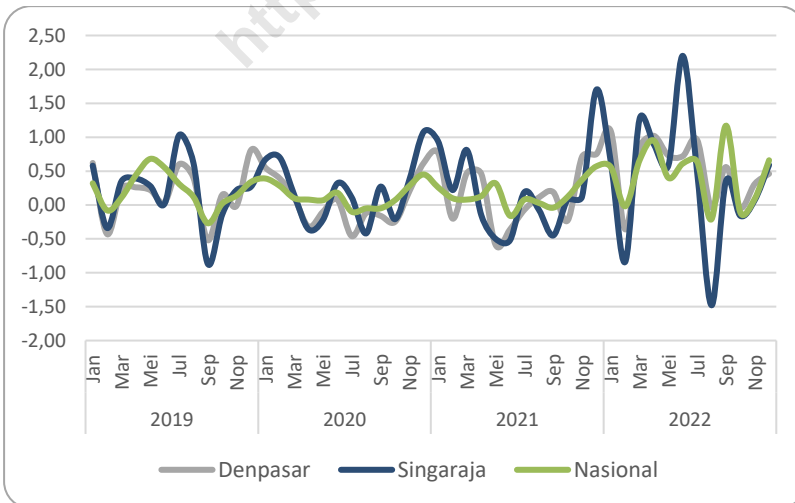
Grafik 1.10

Inflasi Denpasar, Singaraja dan Nasional, 2011 – 2022



Grafik 1.11

Inflasi Bulanan Singaraja, Denpasar dan Nasional, 2020 - 2022



Inflasi tingkat Nasional pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 1,87 persen menjadi 5,51 persen. Sejalan dengan kondisi tersebut, inflasi kota Denpasar di tahun 2022 tercatat 6,44 persen atau meningkat 4,43 poin. Sebaliknya, inflasi kota Singaraja turut naik pada periode waktu yang sama, yakni naik 2,24 poin atau menjadi 4,63 persen di tahun 2022.

Dilihat dari pergerakan inflasi per bulan, inflasi di Kota Denpasar, Kota Singaraja dan Nasional menunjukkan pola yang hampir mirip. Inflasi yang tinggi tercatat pada bulan Januari dan Juli. Sementara itu, kecenderungan penurunan harga/deflasi tercatat pada bulan Februari dan September. Siklus tahunan yang mempengaruhi tingginya nilai inflasi bulan Juli umumnya karena adanya tahun ajaran baru sekolah.

Fluktuasi inflasi di Singaraja terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Denpasar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *spike* yang tajam ke atas maupun curam ke bawah pada **Gambar I.11**. Artinya, terjadi tingkat inflasi yang lebih tinggi maupun deflasi yang lebih dalam di Singaraja dibandingkan dengan Kota Denpasar.

Tabel I.10

Laju Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Menurut Kelompok Pengeluaran,
2022

Kelompok / Group	Denpasar	Singaraja
1 Laju inflasi	6,44	4,63
2 Inflasi Menurut Kelompok		
2.1. Makanan, Minuman dan Tembakau	6,70	6,22
2.2. Pakaian dan Alas Kaki	1,18	0,73
2.3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	4,60	3,06
2.4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	8,63	-1,97
2.5. Kesehatan	2,78	0,56
2.6. Transportasi	15,15	14,94
2.7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,02	0,02
2.8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	5,99	5,53
2.9. Pendidikan	3,64	-0,19
2.10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	5,82	2,56
2.11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,49	5,70

Dilihat dari kelompok komoditas konsumsi, pendorong pergerakan harga pada tahun 2022 antara dua kota di Bali cukup variatif. Di Kota Denpasar maupun Singaraja tercatat mengalami inflasi tertinggi pada kelompok transportasi dengan besaran inflasi masing-masing setinggi 15,15 persen dan 14,94 persen. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel I.10.

BAB II

Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata

II.1 Perdagangan Luar Negeri

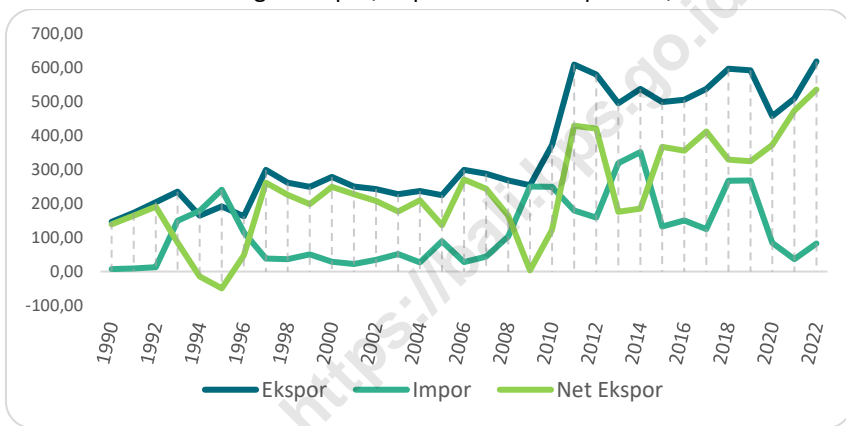
Perdagangan luar negeri merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain, berupa jual beli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan bagi suatu negara. Secara umum perdagangan luar negeri dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara ke negara lainnya. Sementara impor adalah arus kebalikan dari ekspor, yaitu pembelian barang dan jasa oleh suatu negara dari negara lainnya.

Sampai saat ini BPS masih menggunakan konsep F.o.B (*free on board*) untuk menilai besarnya ekspor barang dari satu wilayah. Konsep ini menegaskan bahwa besarnya ekspor dihitung di pelabuhan muat. Harga barang dihitung sampai di atas kapal negara pengeksport meliputi harga barang, pajak ekspor, biaya pengangkutan sampai ke batas negara, biaya asuransi, komisi, biaya pembuatan dokumen, biaya kontainer, biaya pengepakan dan biaya pemuatan barang ke kapal/pesawat udara atau alat transportasi lainnya. Keseluruhan ekspor barang dari Provinsi Bali merupakan komoditi ekspor non migas. Karena seperti diketahui bahwa Provinsi Bali tidak memiliki sumber minyak dan gas bumi.

Sementara untuk impor barang adalah memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Konsep perhitungan impor yang digunakan BPS adalah c.i.f (*cost insurance and freight*), yaitu

penyerahan barang impor di pelabuhan tujuan. Pengertiannya, harga barang sampai di pelabuhan negara pengimpor, meliputi biaya pengangkutan dari batas negara pengekspor ke batas negara pengimpor, biaya bongkar barang dan biaya asuransi pengirim.

Grafik II.1
Perkembangan Ekspor, Impor dan Net Ekspor Bali, 1990 – 2022



Pada Grafik II.1 dapat dicermati tren jangka panjang ekspor dan impor di Provinsi Bali yang cenderung mengalami peningkatan semenjak tahun 1990. Khusus periode 2009 sampai dengan 2011, daya ekspor Bali meningkat tajam bahkan sampai ratusan persen sehingga mencatatkan net perdagangan yang cukup besar kala itu. Sebaliknya, pergerakan 2019-2020 menunjukkan nilai ekspor dan impor yang menurun drastis, akibat pembatasan mobilitas besar-besaran saat badai pandemi Covid-19. Daya ekspor Bali kembali menguat pada tahun 2020-2021 hingga 11,39 persen

dan kondisi pada periode tahun 2021-2022 kembali menguat hingga 21,47 persen. Meningkatnya ekspor setahun terakhir ternyata diikuti dari sisi impor yang tercatat meningkat hingga 130,27 persen. Dengan demikian, net perdagangan terhitung surplus di periode 2022 ini. Surplus perdagangan Bali tahun 2022 yang mencapai US\$534,82 juta, bahkan tercatat paling tinggi sepanjang periode 1990 hingga saat ini.

Tabel II.1
Eskpor Bali Menurut Negara Tujuan, 2021 – 2022

No.	Negara Tujuan	Jan - Des 2021		Jan - Des 2022*)		Perubahan (%)
		Nilai (US\$)	%	Nilai (US\$)	%	
1.	Amerika Serikat	184.994.850	36,40	195.719.300	31,69	5,80
2.	Singapura	13.698.716	2,70	67.233.659	10,89	390,80
3.	Australia	46.256.921	9,10	61.691.395	9,99	33,37
4.	Jepang	25.770.088	5,07	25.183.228	4,08	(2,28)
5.	Tiongkok	35.307.085	6,95	23.451.537	3,80	(33,58)
6.	Perancis	18.454.057	3,63	19.786.026	3,20	7,22
7.	Thailand	8.096.163	1,59	19.362.465	3,14	139,16
8.	Jerman	17.782.641	3,50	18.843.299	3,05	5,96
9.	Inggris	16.440.866	3,24	17.478.049	2,83	6,31
10.	Taiwan	18.165.366	3,57	17.291.484	2,80	(4,81)
11.	Lainnya	123.200.386	24,24	151.474.912	24,53	22,95
Total		508.167.138	100,00	617.515.355	100,00	21,52

Keterangan:

*) Angka Sementara

Kumulatif ekspor barang asal Provinsi Bali pada periode Januari–Desember 2022 mencapai US\$617.515.355, atau mengalami peningkatan 21,52 persen dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat US\$508.167.138. Menurut pangsa pasar, ekspor barang asal Provinsi Bali pada tahun 2022, sebagian besar dikirim ke Amerika Serikat, Singapura, dan Australia dengan proporsi masing–masing 31,69 persen, 10,89 persen dan 9,99 persen sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.1.

Tabel II.2
Ekspor Bali Menurut Komoditas Utama, 2022*

No	Kelompok Komoditas (HS 2 digit)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
1.	Ikan dan Udang (03)	21.639.114	148.225.320	24,00
2.	Perhiasan / Permata (71)	2.916.255	102.922.265	16,67
3.	Pakaian Jadi Bukan Rajutan (62)	373.649	73.819.814	11,95
4.	Kayu, Barang dari Kayu (44)	12.214.484	43.192.049	6,99
5.	Perabot, Penerangan Rumah (94)	1.236.418	42.122.106	6,82
6.	Barang-barang Rajutan (61)	7.450.639	32.022.186	5,19
7.	Kertas / Karton (48)	601.089	29.353.446	4,75
8.	Jerami / Bahan Anyaman (46)	3.322.069	17.273.460	2,80
9.	Barang-barang dari Kulit (42)	440.603	10.345.988	1,68
10.	Kain Perca (63)	1.010.838	8.812.676	1,43
11.	Komoditas Lainnya	18.703.381	100.706.721	16,31
Jumlah		71.046.488	617.515.355	100,00

Keterangan:

*) Angka Sementara

Tabel II.2 menginformasikan bahwa hampir seperempat dari total ekspor Bali tahun 2022 merupakan komoditas ikan, krustasea, dan moluska. Kelompok komoditas lain dengan kontribusi besar terhadap ekspor Bali pada tahun 2022 antara lain perhiasan/permata yang kontribusinya mencapai 16,67 persen meningkat dari tahun sebelumnya 12,32 persen. Komoditas selanjutnya pakaian jadi bukan rajutan yang naik tipis menjadi 11,95 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 11,68 persen.

Tabel II.3
Impor Bali Menurut Negara Asal, 2021 - 2022

No.	Negara Tujuan	Jan - Des 2021		Jan - Des 2022 *)		Perubahan (%)
		Nilai (US\$)	%	Nilai (US\$)	%	
1.	Amerika Serikat	9.373.436	26,10	23.251.403	28,12	148,06
2.	Tiongkok	9.615.244	26,77	12.089.370	14,62	25,73
3.	Hongkong	606.979	1,69	10.029.151	12,13	1.552,31
4.	Australia	4.220.861	11,75	7.455.128	9,01	76,63
5.	Singapura	2.576.029	7,17	5.981.436	7,23	132,20
6.	Jerman	3.868.165	10,77	4.904.079	5,93	26,78
7.	Thailand	1.474.007	4,10	3.266.798	3,95	121,63
8.	Perancis	83.779	0,23	2.295.077	2,78	2.639,44
9.	Italia	755.139	2,10	1.930.666	2,33	155,67
10.	Mexico	34.732	0,10	1.035.807	1,25	2.882,28
11.	Lainnya	3.305.255	9,20	10.459.025	12,65	216,44
Total		35.913.626	100,00	82.697.940	100,00	130,27

Keterangan:

*) Angka Sementara

Secara kumulatif, impor barang Provinsi Bali periode Januari–Desember 2022 mencapai US\$82.697.940. Angka ini mengalami peningkatan hingga 130,27 persen dari nilai impor tahun 2021 yang tercatat US\$35.913.626. Menurut pangsa pasarnya, impor barang Provinsi Bali selama tahun 2022 sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Tiongkok dan Hongkong dengan persentase masing–masing sebesar 28,12 persen, 14,62 persen dan 12,13 persen sebagaimana tersaji pada Tabel II.3.

Tabel II.4
Impor Bali Menurut Komoditas, 2022

No	Kelompok Komoditas (HS 2 digit)	Volume (kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
1.	Mesin dan peralatan listrik (85)	559.397	17.479.805	21,14
2.	Mesin dan perlengkapan mekanik (84)	586.758	14.886.177	18,00
3.	Barang-barang dari Kulit (42)	87.143	9.940.035	12,02
4.	Perhiasan / Permata (71)	53.870	5.051.183	6,11
5.	Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian (33)	181.533	3.417.742	4,13
6.	Lonceng, Arloji dan Bagiannya (91)	128.380	3.159.414	3,82
7.	Perangkat Optik (90)	43.143	2.752.094	3,33
8.	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	4.927.200	2.578.306	3,12
9.	Tembakau (24)	531.584	2.489.916	3,01
10.	Berbagai Produk Kimia (38)	3.892	2.436.050	2,95
11.	Komoditas Lainnya	1.996.411	18.507.218	22,38
Jumlah		1.910.588	15.155.177	100,00

Dilihat dari jenis komoditas, tiga besar pangsa impor Bali tahun 2022 adalah komoditas mesin dan peralatan listrik (21,14 persen); mesin

dan perlengkapan mekanik (18,00 persen); serta barang-barang dari kulit (12,02 persen). Sementara itu, Tabel II.4 menginformasikan bahwa *share* impor di luar sepuluh besar komoditas utama tercatat sebesar 22,38 persen.

II.2 Perkembangan Pariwisata

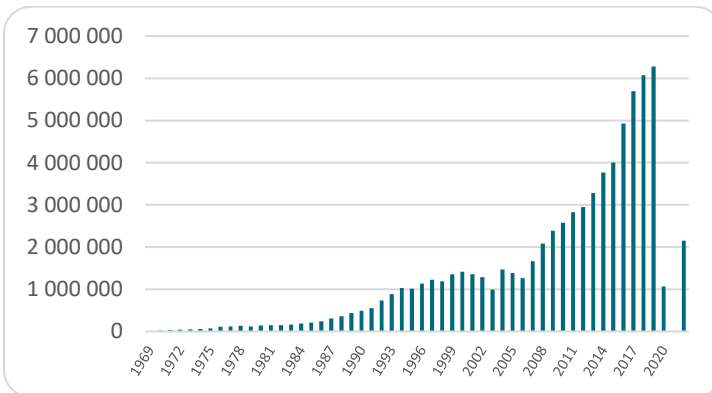
Pariwisata menjadi penggerak utama ekonomi Bali sejak awal milenium. Pariwisata tidak hanya mampu meningkatkan skala ekonomi namun juga memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Bali menjadi lebih heterogen dibandingkan dengan ketika ekonomi Bali hanya digerakkan oleh sektor pertanian. Pariwisata merupakan kekuatan ekonomi yang mempunyai potensi besar di masa yang akan datang. Sektor ini memiliki jangkauan lebih luas terutama didukung oleh semakin cepatnya mobilisasi manusia, serta semakin beragam dan murah biaya transportasi. Namun di satu sisi, sifat pariwisata juga cenderung “labil” akan pengaruh eksternal. Pengaruh keamanan seperti kegiatan terorisme serta bencana alam erupsi Gunung Agung di penghujung 2019, sangat berdampak terhadap aktivitas pariwisata di Bali. Apalagi pada tahun 2020-2021 peristiwa pandemi Covid-19 yang mengisyaratkan protokol *physical distancing* dalam pencegahannya, membuat sektor pariwisata menjadi semakin terpuruk. Perlu usaha ekstra keras dari seluruh pihak untuk memulihkan pariwisata agar bergairah lagi. Perlahan namun pasti, berbagai skema pemulihan ekonomi nasional dan regional diupayakan difokuskan di Bali. Pegelaran

berbagai kegiatan skala nasional dan internasional (KTT G-20) menjadi pemantik pulihnya ekonomi Bali di tahun 2022.

Pada tahun 2022, lonjakan drastis terjadi pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dengan catatan mencapai 2.155.747 kunjungan setelah pada tahun 2021 hanya menyentuh 51 kunjungan. Catatan pada tahun 2021 merupakan capaian kunjungan terendah selama periode lima dekade terakhir, dengan besaran pertumbuhan *year on year* yang hampir terkontraksi sedalam 100,00 persen. Tergambar dari Grafik II.2, penurunan jumlah wisatawan terakhir sebelum pandemi ini terjadi tercatat di tahun 2006 yang kala itu terpengaruh dampak pascabom Bali II. Peningkatan luar biasa terjadi pada jumlah kunjungan tidak terlepas dari mulai meredanya wabah pandemi dan dibukanya kembali akses penerbangan internasional ke Bali disertai euforia para wisatawan untuk kembali berkunjung ke Bali.

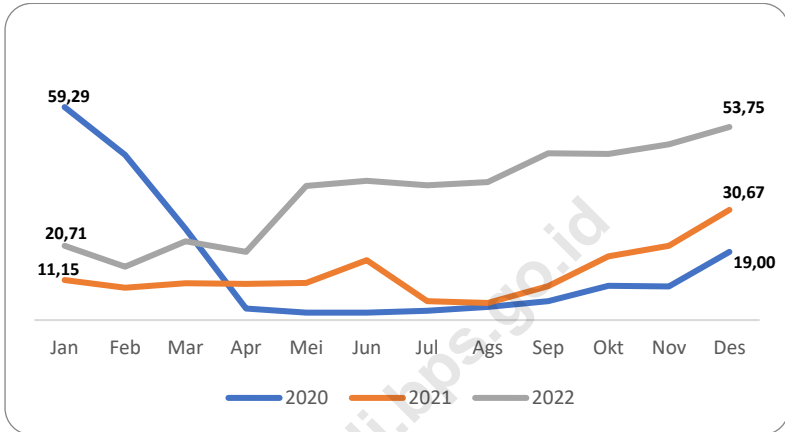
Grafik II.2

Jumlah Kunjungan Wisman ke Bali, 1969 - 2022



Grafik II.3

Perkembangan TPK Hotel Berbintang di Bali Menurut Bulan, 2020-2022

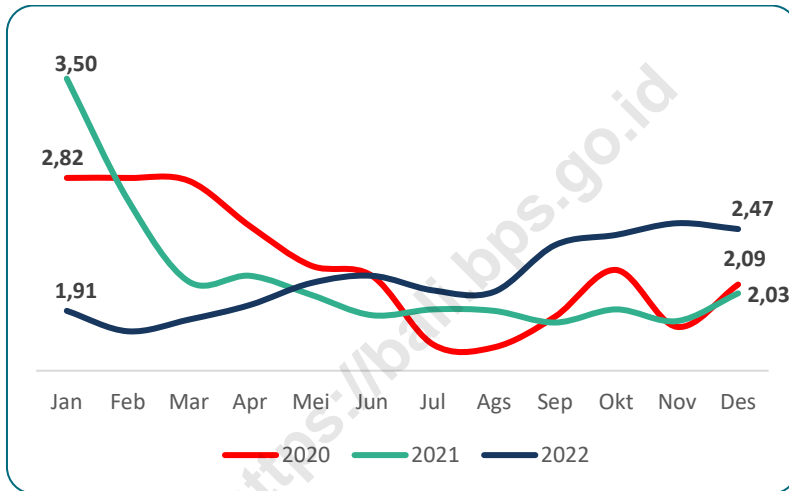


Selain jumlah kedatangan wisman, indikator lain yang juga mencerminkan kondisi pariwisata adalah tingkat penghunian kamar (TPK) hotel. Indikator ini merupakan rasio jumlah kamar yang terjual dibagi dengan jumlah kamar keseluruhan di sebuah hotel. Secara umum, pergerakan nilai TPK hotel berbintang tahun 2022 terlihat lebih tinggi dibanding tahun 2020 dan 2021, sebagaimana disajikan pada Grafik II.3. Jarak melebar lebih tinggi dimulai dari bulan April 2022 dibanding April 2020 dan April 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi April 2020 momentum pertama kali pandemi Covid-19. Pada periode Juni 2021 ke Juli 2021, nilai TPK sempat mengalami penurunan dan kembali menguat sampai akhir Desember 2022 yang secara fenomena tahunan merupakan waktu dari *high season* wisatawan berkunjung ke Bali. Selain itu, peningkatan juga

didorong oleh berbagai kegiatan skala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Bali salah satunya yaitu KTT G20.

Grafik II.4

Perkembangan Rata-rata Lama Menginap Hotel Berbintang Menurut Bulan, 2020 – 2022



Grafik II.4 menggambarkan tren rata-rata lama menginap (RLM) di hotel berbintang pada Januari-Juni tahun 2022 cenderung lebih rendah dibanding dengan setahun sebelumnya, namun pada bulan-bulan selanjutnya menunjukkan tren meningkat. Indikator Rata-rata lama tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya. Selama tiga tahun terakhir nilai RLM pada hotel berbintang terendah tercatat pada Agustus 2020 sebesar 1,66 dan tertinggi pada Januari 2021 sebesar 3,50.

BAB III

Pembangunan Sosial dan Pembangunan Manusia

III.1 Perkembangan Kondisi Kemiskinan

BPS mengidentifikasi masalah kemiskinan muncul karena ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian maupun perumahan. Namun nyatanya permasalahan kemiskinan kini lebih kompleks yaitu menyangkut pada kebutuhan sosial bermasyarakat, serta pada masalah informasi bahkan standar hidup yang memadai. Menurut CK Praland dalam bukunya *The Bottom of Pyramid*, permasalahan kemiskinan yang dulunya dinilai hanya bersifat searah (sebab-akibat) kini dipandang sebagai permasalahan yang bersifat resiprokal (saling mempengaruhi), sehingga dalam ungkapan yang lebih spesifik, kemiskinan adalah salah satu akibat dari beragam akibat lain yang muncul akibat siklus perekonomian dan kemajuan sosial.

Sebagai permasalahan yang multi-dimensional, solusi untuk masalah kemiskinan seyogyanya juga bersifat multi-dimensional. Pemerintah menjadi pilar utama bangunan sosial-ekonomi yang mampu memayungi masyarakat dari bahaya kemiskinan. Artinya solusi yang dilakukan pemerintah hendaknya mampu meng-*counter* setiap *excess* yang ditimbulkan oleh kemiskinan di samping secara paralel mengurangi angka kemiskinan itu sendiri.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Begitupula dengan Bali yang kehilangan gairah perekonomian ketika pandemi Covid-19 menyerang sektor pariwisata, tercermin dari banyak hotel yang tutup, restoran bangkrut serta tempat wisata yang sepi pengunjung. Imbas dari semua ini adalah banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan sehingga tidak bisa dihindari kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin selama masa pandemi. Momentum tersebut kemudian diupayakan dikelola dengan berbagai skema pemulihan ekonomi. Namun demikian situasi global yang tidak pasti dan tekanan inflasi diperkirakan menambah beban penduduk miskin.

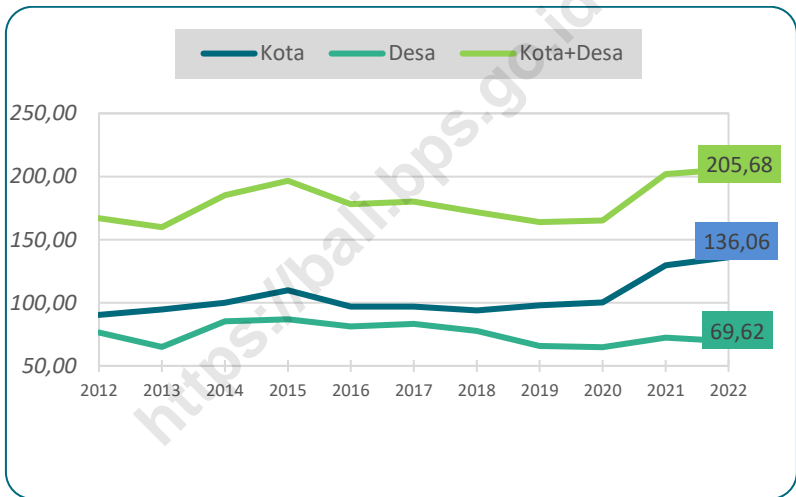
Penduduk miskin di Bali relatif menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun di tahun 2020 dan 2021 jumlahnya mengalami peningkatan sejalan dengan melemahnya kondisi ekonomi regional dan kembali berlanjut di tahun 2022. Sebagian besar penduduk di Bali yang tergolong penduduk miskin masih mendiami wilayah perkotaan, meskipun secara kuantitas tidak berbeda jauh dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan.

Hingga Maret 2022, tercatat jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai 136,06 ribu jiwa sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan sekitar 69,62 ribu jiwa. Kedua besaran tersebut berbeda arah dibanding dengan tahun sebelumnya, dengan catatan peningkatan di wilayah perkotaan sebesar 5,00 persen sedangkan di wilayah perdesaan turun sedalam 3,83 persen. Peningkatan yang lebih besar pada daerah perkotaan merupakan imbas dampak pandemi Covid-19 dan tekanan inflasi kepada sektor-sektor jasa yang mayoritas terdapat di daerah perkotaan

dibandingkan dengan daerah perdesaan. Selain itu, sektor usaha primer seperti sektor pertanian, yang umumnya ada di perdesaan, sekiranya mempunyai ketahanan lebih kuat terhadap pandemi Covid-19 dibanding dengan sektor-sektor usaha lainnya.

Grafik III.1

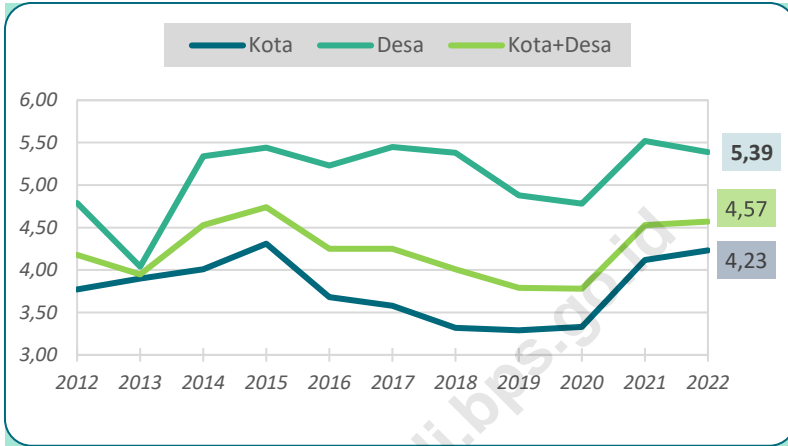
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali kondisi Maret (ribu jiwa)
2012 – 2022



Di sisi lain, peningkatan lebih tinggi persentase penduduk miskin daerah perkotaan dibanding perdesaan mengakibatkan *gap* persentase kedua wilayah tersebut tercatat semakin mengecil. Peningkatan pada daerah perkotaan mencapai 0,11 poin sedangkan pada perdesaan justru mengalami penurunan sedalam 0,13 poin. Secara total persentase penduduk miskin Bali meningkat dari 4,53 persen tahun 2021 menjadi 4,57 persen tahun 2021, sebagaimana tersaji pada Grafik III.2.

Grafik III.2

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali kondisi Maret , 2012-2022



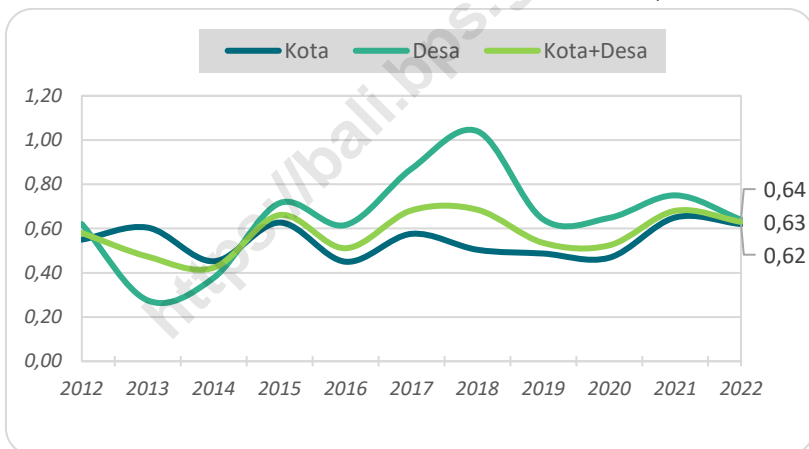
Meskipun persentase penduduk miskin secara umum mengalami peningkatan, namun indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Bali sebaliknya justru menurun. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menandakan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sebaliknya ketika indeks kedalaman kemiskinan rendah semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan Bali tahun 2022 tercatat 0,63, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 0,68. Pada Maret 2022, nilai indeks kedalaman kemiskinan penduduk di wilayah perkotaan sedikit lebih rendah dibandingkan kondisi di perdesaan, sebagaimana tersaji pada

Grafik III.3. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk miskin di wilayah perkotaan memiliki tingkat konsumsi yang lebih mendekati garis kemiskinan dibandingkan dengan yang bermukim di perdesaan. Dengan demikian, penduduk miskin di wilayah perkotaan mempunyai peluang yang lebih besar untuk terlepas dari kemiskinan dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan.

Grafik III.3

Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali kondisi Maret, 2012-2022

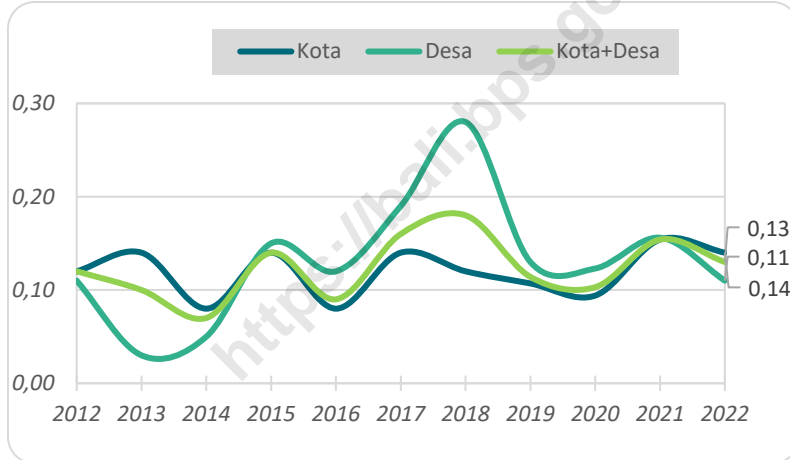


Dari sisi kualitas kemiskinan lainnya, besaran indeks keparahan tahun 2022 juga menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks keparahan pada tahun 2022 tercatat 0,13 atau menurun 0,02 poin dibanding tahun 2021. Tingkat keparahan juga menunjukkan tren pergerakan yang relatif menyerupai pergerakan indeks kedalaman kemiskinan. Lebih fluktuatifnya pergerakan indeks keparahan

perdesaan dalam periode jangka panjang dibandingkan dengan perkotaan diduga karena penciptaan sumber-sumber ekonomi yang tidak seragam di wilayah perdesaan. Sebaliknya, penciptaan sumber-sumber lapangan kerja yang lebih merata di perkotaan mengakibatkan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami pergerakan yang lebih stabil dibandingkan dengan perdesaan.

Grafik III.4

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali kondisi Maret, 2012-2022



III.2 Perkembangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan penduduk dihitung untuk mengetahui apakah pada dasarnya kemajuan perekonomian sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat ataukah hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja. Sebagai daerah pariwisata, tentu Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Tidak heran karena tingginya investasi dari luar negeri banyak pihak yang meragukan apakah pada dasarnya investasi

yang diberikan sebanding dengan yang dinikmati oleh masyarakat Bali dapatkan terutama dikaitkan dengan output yang dihasilkan oleh investasi itu. Timbul juga keraguan beberapa pihak, apakah investasi itu mampu mensejahterakan sebagian besar penduduk, atau malah memperlebar jurang kesenjangan antar penduduk.

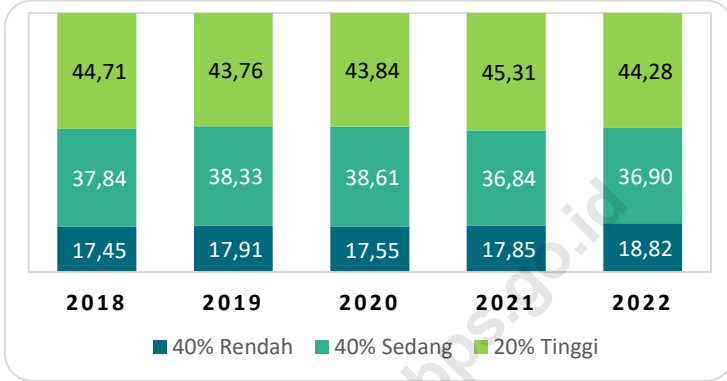
Hal yang umum dilakukan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat suatu daerah adalah dengan pendekatan kriteria Bank Dunia serta Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Kriteria Bank Dunia dihitung yaitu melalui tingkat ketimpangan penduduk yang terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia dapat didefinisikan sebagai berikut:

- ◆ **Ketimpangan Tinggi** (*high inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari total pendapatan penduduk di suatu wilayah, dapat dikatakan “pemerataan rendah/kurang”.
- ◆ **Ketimpangan Sedang** (*moderate inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah menerima 12-17 persen dari total pendapatan penduduk di suatu wilayah, dapat dikatakan “pemerataan sedang”.
- ◆ **Ketimpangan Rendah** (*low inequality*), bila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen total pendapatan penduduk di suatu wilayah, dapat dikatakan “pemerataan tinggi/baik”.

Grafik III.5

Distribusi Pendapatan di Bali menurut Kriteria Bank Dunia
2018 – 2022

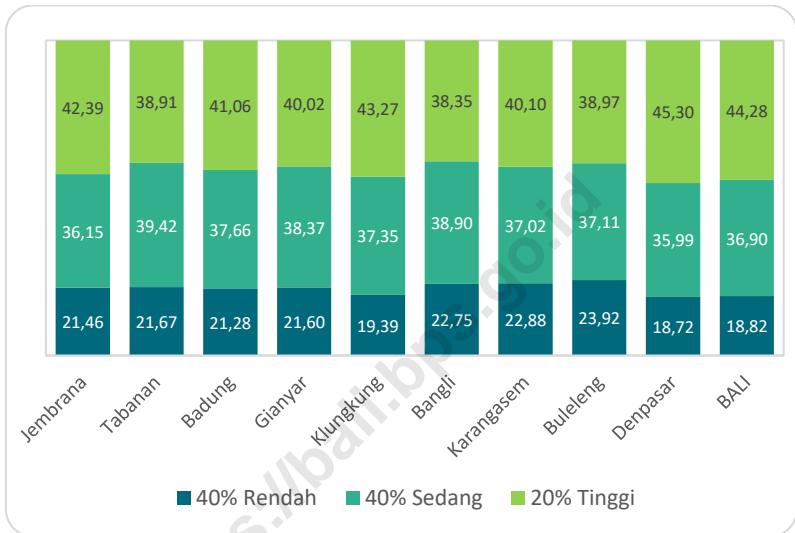


Beberapa tahun terakhir, distribusi ekonomi Bali mayoritas dinikmati oleh kelompok atas, sebagaimana tercermin pada Grafik III.5. Pada tahun 2022, kelompok atas menikmati 44,28 persen kue ekonomi Bali, sebaliknya kelompok terbawah hanya memperoleh kurang dari seperlima kue ekonomi Bali, yakni sebesar 18,82 persen.

Pada tingkatan kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng tergolong memiliki sebaran pendapatan yang masih berimbang antara satu kelompok pendapatan dengan kelompok lainnya. Empat puluh persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah menikmati sekitar 23,92 persen kue ekonominya. Hal ini terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali, sebagaimana tergambar pada Grafik III.6.

Grafik III.6

Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Bali menurut Kriteria Bank Dunia 2022



Distribusi pendapatan penduduk merupakan suatu hal yang sebaiknya diperhatikan dalam melihat kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan yang tinggi hendaknya diikuti oleh pemerataan “kue ekonomi” agar tujuan menyejahterakan penduduk dapat tercapai. Selain distribusi pendapatan, ukuran lain yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (kemiskinan relatif) adalah *gini ratio*.

Dalam penghitungan Rasio Gini ketimpangan pendapatan dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

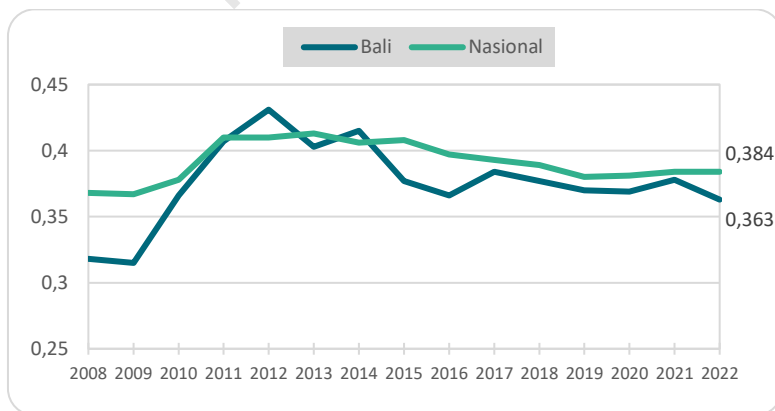
1. **Ketimpangan rendah** jika angka Gini berkisar dari 0,1 hingga 0,2

2. **Ketimpangan sedang** jika rasio Gini berkisar diatas 0,2 hingga 0,5
3. **Ketimpangan tinggi** jika rasio Gini berada diatas 0,5

Sepanjang tahun 2007-2021 terjadi perubahan level pada tingkat ketimpangan di Bali dan Nasional. Grafik III.7 menginformasikan bahwa sewindu terakhir, tingkat ketimpangan Bali tercatat di bawah tingkat ketimpangan secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang ada di Bali lebih rendah dibandingkan sebagian besar wilayah lain yang ada di Indonesia. Di saat yang bersamaan indikator ini juga menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Bali jauh lebih merata dibandingkan dengan sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia.

Grafik III.5

Koefisien Gini Bali dan Nasional, 2008 – 2022

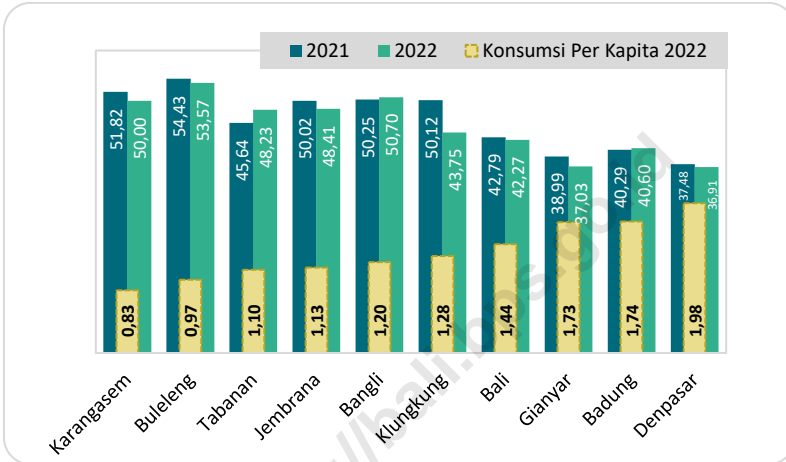


Pada tahun 2022 koefisien Gini Bali tercatat 0,363. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 0,378. Sedangkan pada tingkat nasional, koefisien gini tercatat mencapai angka 0,384 tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan indeks gini relatif **tidak berpengaruh** terhadap kondisi sosial. Akan tetapi apabila transisi perubahan Gini **berlangsung sangat cepat**, maka dampak yang dihasilkan terhadap kondisi sosial di masyarakat akan jauh lebih besar.

Sementara itu perubahan pada level konsumsi diduga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan pada level ketimpangan. Peningkatan pada level konsumsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan rasio gini. Hal ini sedikit banyak mengindikasikan bahwa perubahan pada ketimpangan lebih banyak terjadi pada kelompok yang tidak terlalu berpengaruh pada nilai tengah, yang dalam konteks ini adalah kelompok dengan pengeluaran tertinggi.

Grafik III.8

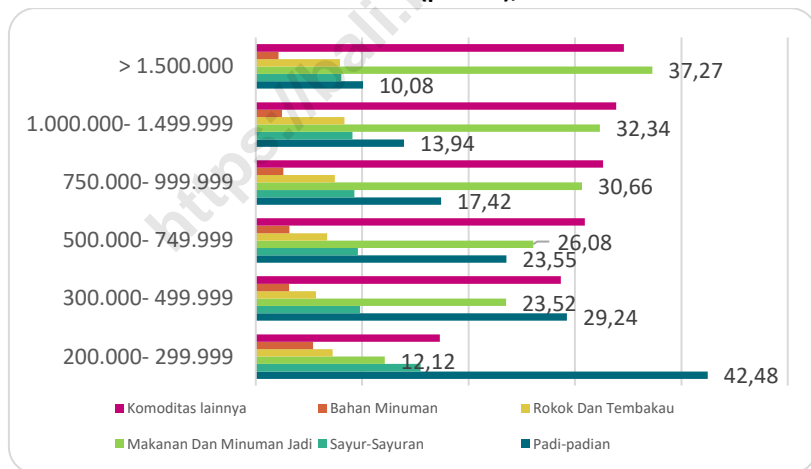
Distribusi Konsumsi Makanan (persen) dan Konsumsi Per Kapita (juta rupiah) menurut Kabupaten/Kota di Bali 2021 dan 2022



Secara umum, hanya tiga daerah yang mengalami peningkatan pada proporsi konsumsi makanan di tahun 2022 yaitu Kabupaten Tabanan, Badung dan Bangli. Selebihnya mengalami penurunan dengan tiga penurunan terdalam tercatat pada Kabupaten Karangasem, Gianyar, dan Klungkung, sebagaimana tersaji pada Grafik III.8. Selanjutnya, proporsi konsumsi non makanan masyarakat di beberapa kabupaten/kota di Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanannya yaitu pada kisaran 40 persen terhadap total konsumsi. Ketiga wilayah dengan proporsi konsumsi non makanan tertinggi tercatat pada Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Badung.

Di sisi lain, ada hal yang cukup menarik diamati terkait dengan konsumsi masyarakat Bali. Pada wilayah dengan tingkat pengeluaran tertinggi, rasio konsumsi makanan justru semakin rendah. Sebagai contoh wilayah Kota Denpasar yang konsumsi per kapitanya mendekati dua juta rupiah, komposisi konsumsi makanan berada di bawah 40 persen. Kondisi ini cukup berbeda dengan Karangasem, dengan konsumsi per kapita kurang dari setengah Denpasar, proporsi konsumsi makanannya berada pada kisaran 50 persen.

Grafik III.9
Pengeluaran Makanan Menurut Komoditas dan Golongan Pengeluaran
Penduduk Bali (persen), 2022



Selanjutnya, pada Grafik III.9 disajikan komposisi pengeluaran makanan di Bali menurut komoditas yang dibedakan berdasarkan golongan pengeluaran penduduk pada tahun 2022. Jika dilihat dari komposisi makanan yang dikonsumsi, terlihat bahwa masyarakat pada kelompok

pengeluaran terendah di Provinsi Bali mengalokasikan mayoritas pengeluaran makanannya untuk membeli bahan makanan dari kelompok padi-padian. Sebaliknya konsumsi bahan makanan dan minuman jadi cenderung meningkat drastis seiring dengan peningkatan golongan pengeluaran, artinya dengan daya beli yang lebih tinggi maka penduduk akan cenderung mengkonsumsi makanan dan minuman jadi.

III.3 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja memiliki peran strategis dalam pembangunan terutama berperan untuk kegiatan produksi. Hanya saja dalam prosesnya, optimalisasi produktivitas tenaga kerja berbeda dibandingkan dengan optimalisasi faktor produksi atau sumber daya modal lainnya. Apabila peningkatan produktivitas sumber daya modal ditempuh melalui riset dan teknologi, maka proses peningkatan pada sumber daya manusia harus melewati jalan panjang yaitu berupa peningkatan pada aspek-aspek kehidupan yang ditempuh dengan perbaikan kualitas hidup terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan terutama dengan meningkatkan insentif dan memberikan jaminan/tanggung, permasalahan ketenagakerjaan masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan ini tidak bersifat lokal atau hanya terjadi di Bali melainkan berskala nasional. Beberapa di antaranya adalah permasalahan terkait *outsourcing*, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja, serta masalah tenaga kerja asing.

Permasalahan *outsourcing* masih belum sepenuhnya terselesaikan, karena meskipun aspek legalitas serta tata laksananya sudah diatur, implementasi pengelolaan yang baru belum sepenuhnya dilaksanakan.

Masalah pengupahan cukup rumit dalam ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena menurut beberapa kalangan, upah tenaga kerja di negara berkembang menjadi insentif utama dengan peran yang jauh lebih penting dibandingkan dengan insentif lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara tingkat upah yang layak bagi buruh maupun pengusaha sulit tercapai. Di sisi lain, sistem pengupahan di Indonesia masih menggunakan upah untuk status lajang sehingga akan menjadi kurang ketika upah yang diberikan digunakan untuk menghidupi sebuah keluarga.

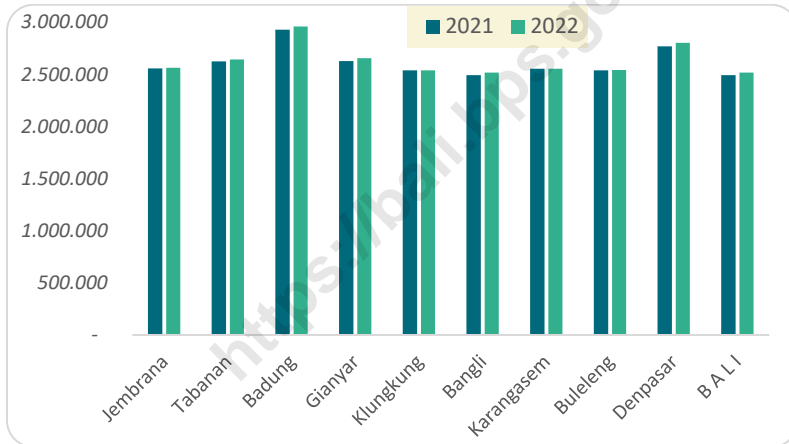
Konsep upah minimumpun seringkali berbeda dalam implementasinya. Upah minimum hanya mampu diterapkan pada pekerja dengan status pekerja formal namun sangat sulit diterapkan dalam pekerja informal. Tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia membuat sebagian besar pekerja mau menerima upah di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan. Selain itu, minimnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja seringkali juga berdampak pada standar upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Bali pada tahun 2022 tercatat di Kabupaten Badung yang mencapai 2,96 juta rupiah/bulan. Sementara itu UMK terendah di Kabupaten Bangli yang tercatat 2,52 juta rupiah/bulan. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tercatat mencapai 2,49

juta rupiah/bulan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 790/03-M/HK/2021, tanggal 30 November 2021, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022, upah minimum antara tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami perubahan yang drastis disebabkan oleh masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Gambaran besaran UMR menurut kabupaten/kota disuguhkan pada Grafik III.10.

Grafik III.10

UMR Kabupaten/Kota dan UMP Provinsi Bali, 2021 dan 2022 (Rp.)



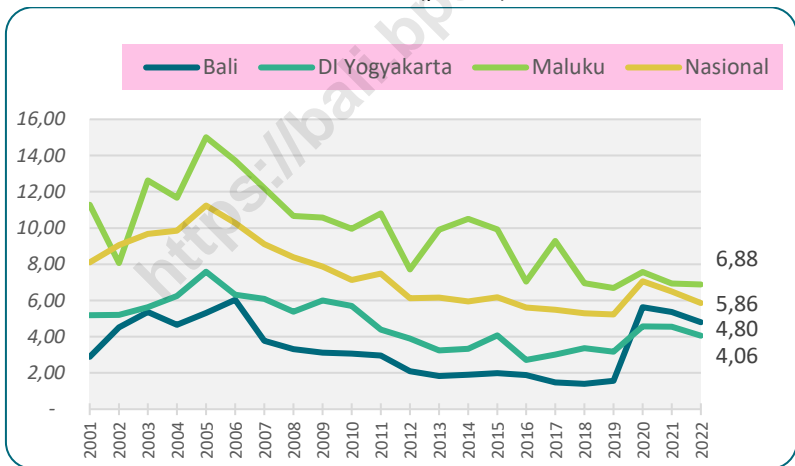
Selain pada penentuan upah minimum, penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian juga menjadi fokus perhatian. Menurut teori ekonomi murni, pengangguran pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary unemployment*) artinya pengangguran terjadi karena tenaga kerja tidak mau bekerja pada sembarang tingkat upah tertentu. Jika seseorang mau

bekerja apa saja pada tingkat upah berapa saja, maka pengangguran tidak akan terjadi.

Teori ekonomi juga meyakini bahwa pada dasarnya daerah memiliki tingkat pengangguran tinggi karena sedikitnya kesempatan kerja dan rendahnya penyerapan angkatan kerja. Untuk itu kiranya diperlukan apa yang disebut sebagai pengembangan spesialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Grafik III.11

Tingkat Pengangguran Terbuka Bali, Nasional, dan Beberapa Provinsi, 2001-2022 (persen)



Tren pengangguran selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Wilayah dengan sumber ekonomi berbasis agraris dan jasa relatif memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berbasis industri. Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali sebesar 4,80 persen mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 5,37 persen. Dapat diinterpretasikan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 5 orang merupakan pengangguran. Sesuai grafik III.11, menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir tren TPT nasional berada di atas TPT Bali dan TPT DI Yogyakarta.

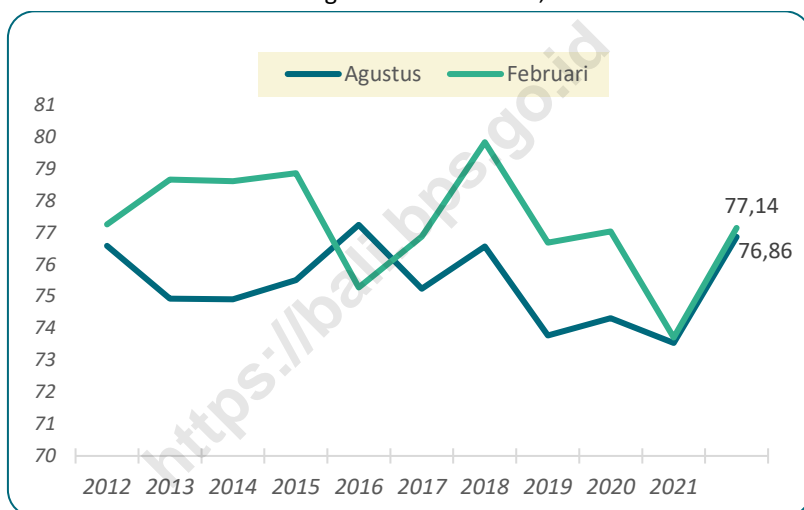
TPT Bali tahun 2022 merupakan TPT tertinggi ke tiga selama sepuluh tahun terakhir. Secara tidak langsung, tingginya besaran TPT Bali pada tahun 2022 merupakan dampak pandemi Covid-19 yang telah melanda Bali sejak bulan Maret 2020. Pembatasan mobilitas dan pergerakan masyarakat serta penutupan bandara bahkan tempat-tempat wisata memberi pengaruh luar biasa terhadap sektor jasa yang merupakan tumpuan utama perekonomian Bali. Melemahnya perekonomian regional membuat kemampuan penyerapan tenaga kerja Bali jauh menurun, ditambah lagi banyaknya pekerja yang mengalami pemberhentian sementara tanpa adanya kejelasan status masa depan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi selama masa pandemi juga turut serta meningkatkan jumlah pengangguran di Bali.

Selain tingkat pengangguran terbuka, perhatian pada ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang ditampilkan pada grafik III.12. TPAK yang tinggi menjadi indikasi pengangguran yang lebih rendah, dan untuk Bali TPAK dalam beberapa tahun terakhir cenderung berfluktuasi. TPAK pada tahun 2022 meningkat dari 73,54 persen menjadi 76,86. TPAK Februari 2022 meningkat

dari 73,71 persen menjadi 77,14 persen. Fenomena ini menjadi salah satu indikator pendukung mulai pulihnya situasi perekonomian setelah guncangan pandemi Covid-19. Kembalinya proses aktivitas produksi diperkirakan menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk.

Grafik III.12

TPAK Bali Bulan Agustus dan Februari, 2012 – 2022

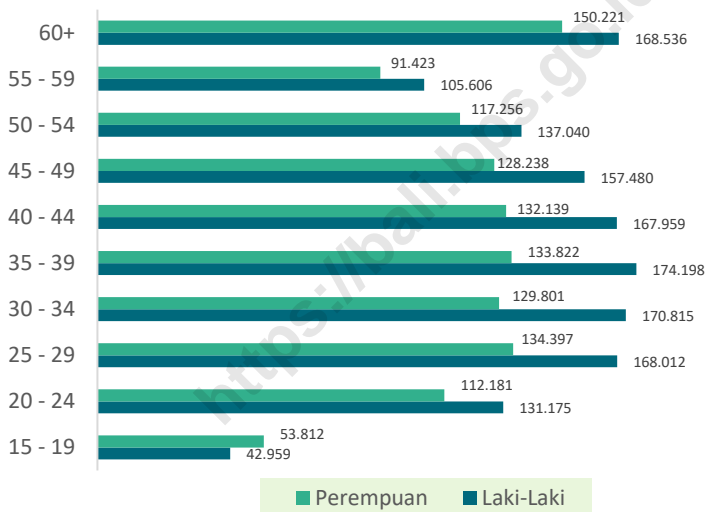


Dilihat dari usianya, sebagian besar tenaga kerja di Bali berada pada kelompok usia di atas 30 tahun, sebagaimana tergambar pada Grafik III.13. Hal yang menarik, persentase angkatan kerja di Bali yang bekerja pada kelompok usia sekolah (15-24 tahun) relatif cukup tinggi. Persentase di kelompok usia ini mencapai angka 13,05 persen. Selain itu persentase untuk kelompok usia di atas 60 tahun juga cukup tinggi yaitu 12,23 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan murni Bali

(memperhitungkan penduduk yang bekerja di semua kelompok umur) akan lebih rendah dibandingkan dengan rasio ketergantungan secara keseluruhan.

Grafik III.13

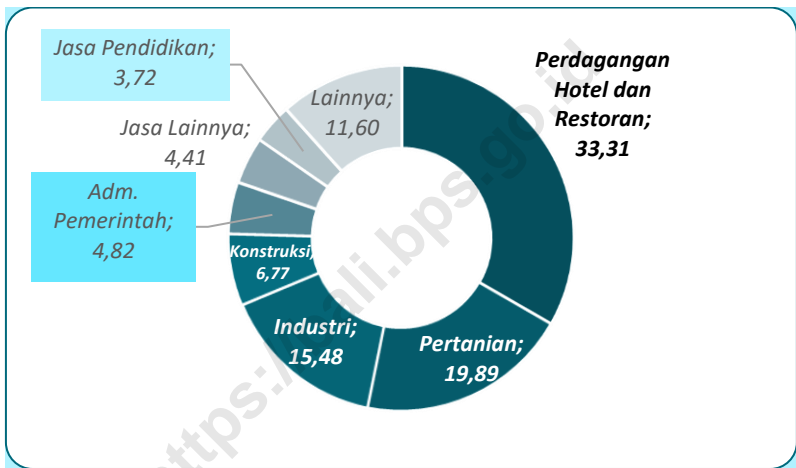
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Bali, 2022



Dari 2,60 juta angkatan kerja di Provinsi Bali yang bekerja pada tahun 2022, hampir sepertiganya bekerja di sektor jasa terutama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (33,31 persen). Lapangan usaha dengan jumlah pekerja tertinggi selanjutnya adalah lapangan usaha pertanian dan industri dengan besaran proporsi angkatan kerja masing-masing sebesar 19,89 persen dan 15,48 persen. Selebihnya, kisaran di luar ketiga lapangan

usaha tersebut tercatat pada kisaran di bawah 10 persen, sebagaimana ditampilkan pada Grafik III.14.

Grafik III.14
Proporsi Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Bali, 2022



III.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai salah satu indikator pokok untuk menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, IPM seringkali digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari tiga sudut pandang kelayakan hidup yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga komponen ini diberikan bobot yang setara akan tetapi berbeda dalam konfigurasiya sendiri.

Konsep IPM ini telah lama diperkenalkan oleh **Amartya Sen** dan **Mahub al Haq**, dua ekonom dari Asia Selatan. Dalam perjalanannya hanya

Sen yang kemudian menjadi nobelis ekonomi untuk karya-karyanya di bidang pemerataan pembangunan. Terlebih dari indeks awal yang diterbitkan oleh UNDP, Badan Pusat Statistik melakukan pematokan ulang (refiksasi) untuk standardisasi IPM agar sekiranya bisa digunakan untuk mewakili kondisi di Indonesia. Kalibrasi ulang ini juga diperlukan untuk menjaga keterbandingan wilayah-wilayah di Indonesia.

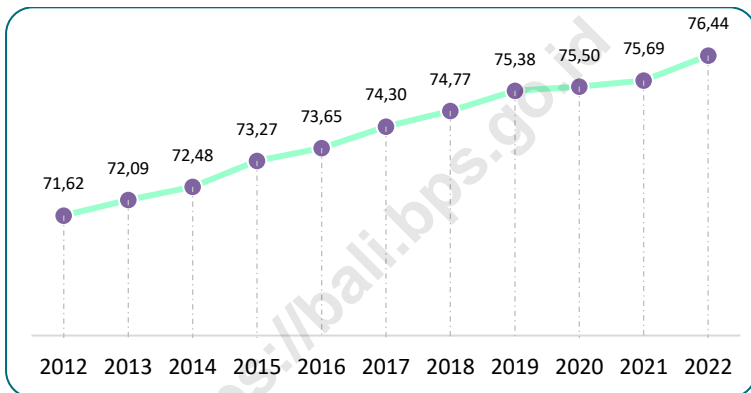
Dalam *Human Development Report (HDR)* tahun 1990, UNDP memperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Nilai dari ketiga indikator itu kemudian digabungkan atau diagregasi dengan menggunakan rata-rata hitung atau aritmetis.

Penyempurnaan pertama untuk metode ini dilakukan pada tahun 1991. Pada revisi yang pertama ini, komponen pendidikan tidak hanya menggunakan AMH melainkan kombinasi antara AMH dengan rata-rata lama sekolah (RLS). Metode agregasi tidak mengalami perubahan pada revisi ini.

Pada penyempurnaan kedua di tahun 1995, komponen RLS dihilangkan dari penghitungan. Komponen ini kemudian digantikan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dihitung dari setiap jenjang pendidikan. Sementara itu pada revisi ketiga di tahun 2010 tidak hanya mengubah metode agregasi dengan metode geometrik, akan tetapi menandai

kembaliya RLS sebagai indikator acuan penghitungan. Pada tahun ini komponen AMH dihilangkan dan digantikan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) karena indikator AMH dianggap sudah stagnan dan kurang mencerminkan keragaman.

Grafik III.15
Perkembangan IPM Bali 2012 - 2022



IPM Bali pada tahun 2012-2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, tergambar dari Grafik III.15. Pada tahun 2022, IPM Bali tercatat sebesar 76,44. Sementara pada tahun 2012, IPM Bali waktu itu tercatat sebesar 71,62. Dengan kata lain, peningkatan IPM selama satu dasawarsa mencapai 4,82 poin. Secara rata-rata, peningkatan IPM setiap tahun selama periode 2012-2022 mencapai 0,48 persen.

Pertumbuhan IPM pada periode tahun 2012 hingga tahun 2022 tidak mengubah status capaian IPM Bali. Semenjak tahun 2010 hingga saat ini, status IPM masih tergolong “tinggi”. Namun menjadi catatan bahwa capaian IPM Bali tahun 2022 belum melampaui target Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 khususnya tahun 2022 yang memasang target akhir tahun sebesar 76,93.

Tabel III. 1

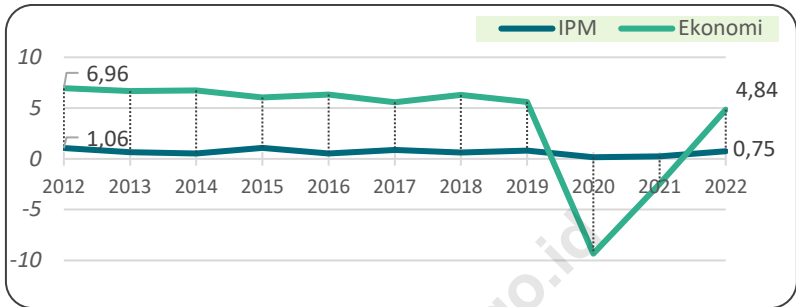
Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2012-2022

Bali	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPM	71,62	72,09	72,48	73,27	73,65	74,3	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44
Peningkatan	0,75	0,47	0,39	0,79	0,38	0,65	0,47	0,61	0,12	0,19	0,75
Pertumbuhan	1,06	0,66	0,54	1,08	0,53	0,88	0,63	0,82	0,16	0,25	0,99
Status IPM	Tinggi										

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, maka pola yang terjadi nampak sejalan. Pada sisi pertumbuhan penciptaan nilai tambah ekonomi maupun sisi pertumbuhan IPM cenderung mengalami perlambatan. Walaupun demikian, hal ini nampaknya menunjukkan bahwa ada kemungkinan apa yang dihasilkan oleh suatu proses ekonomi, memiliki korelasi terhadap dampak yang dihasilkan sehubungan dengan kenaikan kualitas hidup masyarakat. Sekiranya, pertumbuhan ekonomi di Bali terasa cukup merata sehingga juga mampu diikuti oleh peningkatan kapabilitas penduduk dalam proses pencapaiannya. Sebaliknya, kaitan antara kualitas manusia akan menjadi modal kapital untuk mengkaptivasi perekonomian di suatu wilayah. Dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, kecenderungan mampu mendukung proses penciptaan nilai tambah yang lebih efektif dan tentunya akan bermuara pada efisiensi serta ekonomi yang berkualitas.

Grafik III.16

Pertumbuhan IPM dan Ekonomi Bali, 2012 – 2022



Jika dibandingkan menurut kabupaten/kota (Tabel III.2), hanya IPM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang tercatat pada capaian IPM golongan “sangat tinggi”. Capaian IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi” pada tahun 2012. IPM tertinggi kedua setelah Kota Denpasar ditempati oleh Kabupaten Badung. IPM Kabupaten Badung pada tahun 2017 mengalami pergeseran status menjadi sangat tinggi dengan capaian IPM sebesar 80,54. Pada tahun 2022, capaian kedua wilayah tersebut masih menempati posisi dua besar tertinggi dibandingkan wilayah lain di Bali dengan besaran masing-masing 84,37 (Denpasar) dan 82,13 (Badung).

Sementara itu, capaian IPM terendah menurut kabupaten/kota di Bali tercatat di Kabupaten Bangli dan Karangasem. Capaian IPM kedua kabupaten tersebut masih tergolong “sedang”, tidak mengalami perubahan. Namun jika ditinjau dari sisi nilai, keduanya sudah mendekati nilai kategori “tinggi” yang mensyaratkan nilai minimal 70,00. Pada tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Karangasem tercatat 68,28, sedangkan Kabupaten Bangli tercatat 70,26. IPM di Kabupaten Bangli meningkat dari

kategori “sedang” pada tahun 2021 (69,37) menjadi kategori tinggi pada tahun 2022. Dengan demikian pada tahun 2022 hanya satu kabupaten yang masih memiliki IPM dengan status “sedang” yaitu Karangasem.

Tabel III.2

Perkembangan IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2020 - 2022

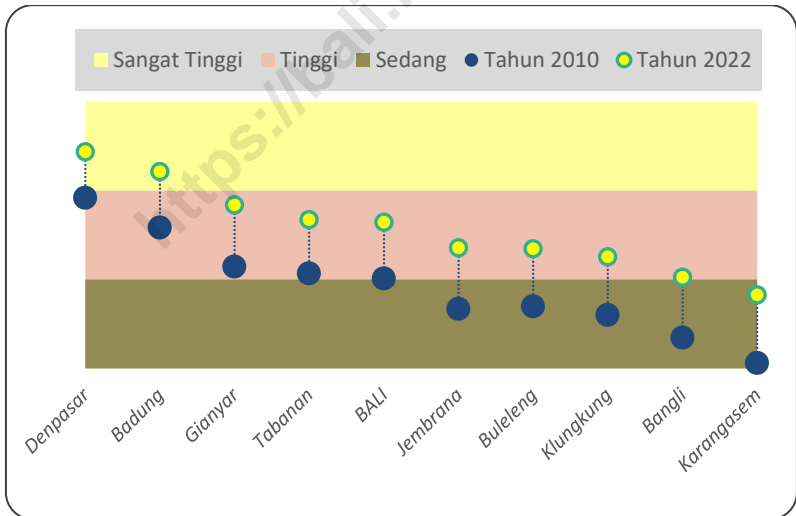
Kabupaten/Kota	IPM			Pertumbuhan (%)			Status IPM Tahun 2022
	2020	2021	2022	2019-2020	2020-2021	2021-2022	
Jembrana	72,36	72,75	73,58	0,01	0,54	1,14	Tinggi
Tabanan	76,17	76,45	76,75	0,01	0,37	0,39	Tinggi
Badung	81,60	81,83	82,13	0,01	0,28	0,37	Sangat Tinggi
Gianyar	77,36	77,70	78,39	0,29	0,44	0,89	Tinggi
Klungkung	71,73	71,75	72,55	0,03	0,03	1,11	Tinggi
Bangli	69,36	69,37	70,26	0,01	0,01	1,28	Tinggi
Karangasem	67,35	67,36	68,28	0,01	0,01	1,37	Sedang
Buleleng	72,55	72,56	73,45	0,35	0,01	1,23	Tinggi
Kota Denpasar	83,93	84,03	84,37	0,30	0,12	0,40	Sangat Tinggi
Bali	75,50	75,69	76,44	0,16	0,25	0,99	Tinggi

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, semua kabupaten/kota mengalami percepatan pertumbuhan IPM pada tahun 2022. Kabupaten Karangasem tercatat sebagai wilayah yang mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi yakni meningkat 0,92 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM di Kabupaten Badung menjadi pertumbuhan terendah mengingat capaian di wilayah tersebut sudah

sangat tinggi. Percepatan ke capaian yang lebih tinggi cenderung lebih lambat dibandingkan kabupaten kota yang lain di Provinsi Bali.

Berdasarkan grafik III.17, Kabupaten Karangasem dengan nilai IPM terkecil tahun 2022 ternyata menjadi wilayah dengan capaian rentang IPM tertinggi selama sebelas tahun terakhir. IPM Karangasem periode 2010-2021 mampu naik 7,70 poin atau tercatat tumbuh 12,71 persen. Meskipun demikian, hingga tahun 2022 hanya Karangasem yang tercatat masih masuk ke dalam status IPM “sedang” diantara wilayah lainnya di Provinsi Bali.

Grafik III.17
Pergerakan Status Capaian IPM Bali Menurut Kabupaten/Kota
2010 – 2022



Sebagai indikator yang sekiranya mampu mengukur pencapaian pembangunan manusia, IPM memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap

komponennya. Selain itu patokan nilai dasarnya juga tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika tidak terjadi perubahan destruktif yang signifikan seperti halnya bencana alam, atau peperangan, capaian IPM relatif tidak akan mengalami penurunan. Pada Tabel III.3 ditampilkan komponen pembentuk IPM Bali pada periode 2020-2022.

Tabel III.3
Komponen Pembentuk IPM Bali, 2020 - 2022

Komponen	Satuan	2020	2021	2022
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	72,13	72,24	72,60
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	13,33	13,40	13,48
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,95	9,06	9,39
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp Juta	13,93	13,82	13,94
IPM		75,50	75,69	76,44

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel III.4 UHH penduduk Bali pada tahun 2022 mencapai 72,60 tahun atau meningkat 0,36 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan UHH pada tahun 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan tahun 2020 yang mencapai 0,11 tahun.

Kabupaten Badung tercatat memiliki UHH tertinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi Bali. UHH Badung pada tahun 2022 tercatat mencapai 75,51 tahun atau meningkat 0,33 tahun dibandingkan dengan tahun 2021. UHH tertinggi setelah Kabupaten Badung adalah Kota Denpasar, yang pada tahun 2022 UHH-nya mencapai 75,30 tahun.

Sementara itu wilayah dengan UHH terendah pada tahun 2022 tercatat pada Kabupaten Karangasem dengan capaian 70,89 tahun.

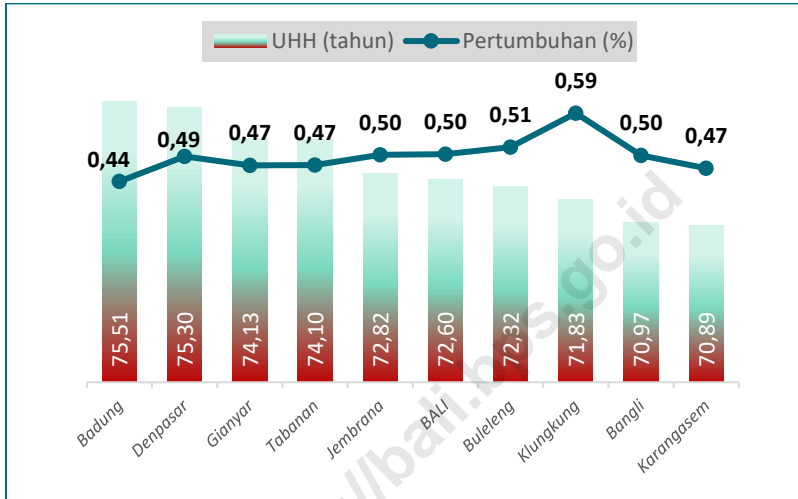
Tabel III.4
Umur Harapan Hidup (UHH) Bali, 2012-2022

Kabupaten/ Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jembrana	71,09	71,26	71,39	71,43	71,57	71,70	71,91	72,21	72,35	72,46	72,82
Tabanan	72,35	72,52	72,64	72,74	72,89	73,03	73,23	73,53	73,65	73,75	74,10
Badung	74,05	74,19	74,30	74,31	74,42	74,53	74,71	74,99	75,10	75,18	75,51
Gianyar	72,57	72,71	72,78	72,84	72,95	73,06	73,26	73,56	73,68	73,78	74,13
Klungkung	69,66	69,84	69,91	70,11	70,28	70,45	70,70	71,06	71,25	71,41	71,83
Bangli	69,18	69,36	69,44	69,54	69,69	69,83	70,05	70,37	70,52	70,62	70,97
Karangasem	68,96	69,12	69,18	69,48	69,66	69,85	70,05	70,35	70,47	70,56	70,89
Buleleng	70,41	70,58	70,71	70,81	70,97	71,14	71,36	71,68	71,83	71,95	72,32
Kota Denpasar	73,44	73,56	73,71	73,91	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82	74,93	75,30
BALI	70,94	71,11	71,20	71,35	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60

Umur Harapan Hidup Kabupaten Klungkung meskipun menempati urutan terendah ke tiga pada tahun 2022, namun memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Pertumbuhan UHH Klungkung tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 tercatat sebesar 0,59 persen. Pertumbuhan UHH tertinggi selanjutnya tercatat di Kabupaten Buleleng yang tercatat tumbuh 0,51 persen. Selanjutnya, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana menjadi tertinggi ketiga dengan besaran pertumbuhan yang sama yakni sebesar 0,50 persen. Kabupaten Badung menjadi wilayah dengan pertumbuhan UHH terendah yang pada tahun 2022 ini hanya mampu tumbuh 0,44 persen, sebagaimana tersaji pada Grafik III.8.

Grafik III.18

Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Bali dan Pertumbuhannya, 2022

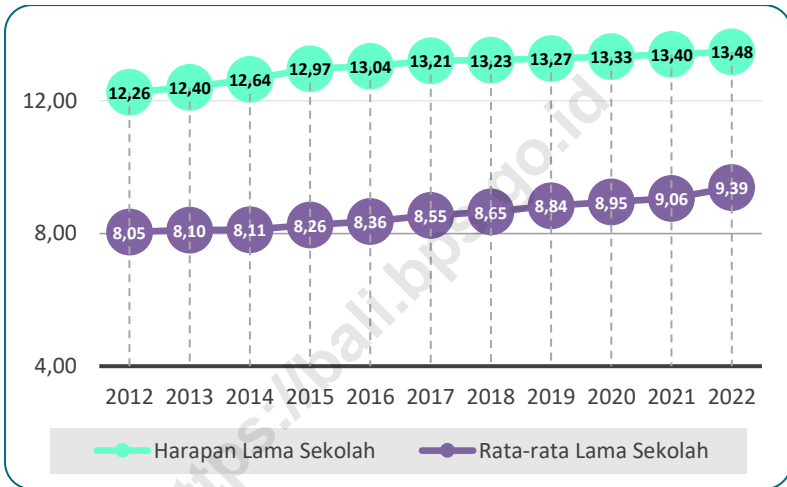


Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara teori, apabila melihat kondisi terkini maka rata-rata lama sekolah (RLS) akan lebih mencerminkan kondisi atau kualitas pendidikan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Bali tercatat 13,48 tahun atau meningkat sebesar 0,08 tahun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 13,40 tahun. Kenaikan HLS di tahun ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,07 tahun. HLS Bali yang sebesar 13,48 tahun memiliki arti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun

2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,48 tahun atau setara dengan Diploma II.

Grafik III.19

Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali, 2012 – 2022



Tabel III.5 menginformasikan bahwa, Kota Denpasar sebagai daerah dengan HLS tertinggi pada tahun 2022. Capaian HLS Kota Denpasar tercatat 14,10 tahun atau meningkat 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. HLS Kota Denpasar pada tahun 2022 tersebut hanya berada sedikit di atas Badung dan Gianyar yang tercatat 14,03 tahun dan 14,01 tahun. Di sisi lain, Bangli merupakan kabupaten dengan capaian HLS terendah di tahun 2022 dengan catatan sebesar 12,49 tahun.

Tabel III.5

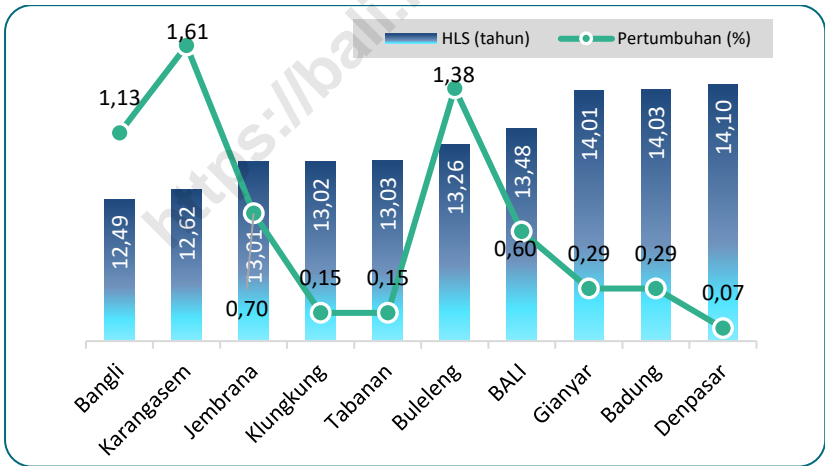
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Bali dan Kenaikannya Menurut Kabupaten/kota, 2020-2022

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Kenaikan (Tahun)		
	2020	2021	2022	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Jembrana	12,65	12,92	13,01	0,02	0,27	0,09
Tabanan	13,00	13,01	13,03	0,01	0,01	0,02
Badung	13,98	13,99	14,03	0,01	0,01	0,04
Gianyar	13,89	13,97	14,01	0,09	0,08	0,04
Klungkung	12,99	13,00	13,02	0,01	0,01	0,02
Bangli	12,34	12,35	12,49	0,01	0,01	0,14
Karangasem	12,41	12,42	12,62	0,01	0,01	0,20
Buleleng	13,07	13,08	13,26	0,16	0,01	0,18
Kota Denpasar	14,00	14,09	14,10	0,01	0,09	0,01
Bali	13,33	13,40	13,48	0,06	0,07	0,08

Secara umum, kenaikan HLS pada periode 2021–2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 2020-2021. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Karangasem sebesar 0,20 tahun kemudian disusul oleh Kabupaten Buleleng dengan peningkatan 0,18 tahun. Meskipun menempati posisi HLS terendah, peningkatan nilai HLS di Bangli tercatat sebagai peningkatan tertinggi keempat dengan besaran 0,14 tahun. Peningkatan HLS terendah pada tahun 2022 terjadi di Kota Denpasar yakni hanya naik 0,01 tahun dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, angka HLS kabupaten/kota di Bali secara rata-rata tumbuh 0,64 persen. Besaran tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang secara rata-rata tumbuh 0,42 persen. Selama periode 2021-2022, pertumbuhan HLS tertinggi tercatat pada Kabupaten Karangasem yang mampu tumbuh hingga 1,61 persen. Grafik III.20 mencatatkan dua pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah di Kabupaten Buleleng dengan pertumbuhan 1,38 persen dan Kabupaten Bangli dengan pertumbuhan 1,13 persen.

Grafik III.20
 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Bali
 dan Pertumbuhannya, 2022



Komponen dimensi pendidikan lain yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 untuk semua kabupaten/kota. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang juga mencerminkan dimensi pendidikan, mendefinisikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun

2022, RLS Provinsi Bali tercatat sebesar 9,39 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Bali yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,39 tahun atau menamatkan Pendidikan formal sampai kelas tiga SMP. Komponen RLS Bali Tahun 2022 meningkat 0,33 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat selama 9,06 tahun. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan tahun sebelumnya yang meningkat 0,11 tahun.

Pada Tabel III.6 memperlihatkan bahwa RLS Kota Denpasar tercatat yang paling tinggi pada tahun 2022, dengan besaran mencapai 11,50 tahun. Setelah Denpasar adalah kabupaten Badung dan Gianyar yang masing-masing catatan RLS-nya sebesar 10,64 tahun dan 9,55 tahun. Sementara itu, Kabupaten Karangasem tercatat sebagai wilayah dengan RLS terendah yakni 6,67 tahun. Berdasarkan capaian RLS tahun 2022, hanya empat wilayah di Bali yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang tercatat memiliki RLS setara dengan pendidikan di atas SMP.

Dilihat dari kenaikan 2021-2022, lima dari sembilan kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibanding kenaikan pada periode sebelumnya. Tiga kenaikan RLS tertinggi periode 2021-2022 tercatat pada Kabupaten Karangasem yang naik 0,34 tahun, Kabupaten Klungkung yang naik 0,32 tahun, dan Kabupaten Buleleng yang naik 0,31 tahun.

Selama tiga tahun terakhir, rata-rata kenaikan tahunan RLS seluruh kabupaten/kota tercatat sebesar 0,21 tahun. Kabupaten Gianyar tercatat sebagai daerah yang memiliki rata-rata kenaikan tertinggi yakni

0,20 tahun. Sebaliknya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan yang rata-rata kenaikan tahunan RLS sebesar 0,09 tahun tercatat sebagai yang terendah selama tiga tahun terakhir.

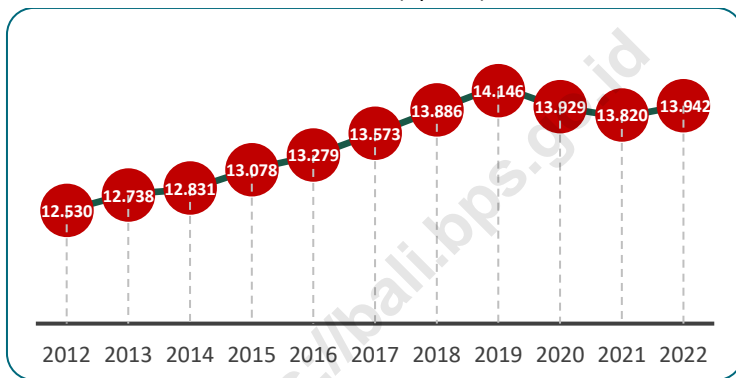
Tabel III.6
Rata-rata Lama Sekolah/*Mean Years of Schooling* (MYS)
Menurut Kabupaten/Kota di Bali, 2020-2022

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			Kenaikan (Tahun)		
	2020	2021	2022	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022
Jembrana	8,23	8,35	8,64	0,01	0,12	0,29
Tabanan	8,88	9,14	9,15	0,01	0,26	0,01
Badung	10,39	10,62	10,64	0,01	0,23	0,02
Gianyar	9,04	9,29	9,55	0,10	0,25	0,26
Klungkung	8,13	8,14	8,46	0,01	0,01	0,32
Bangli	7,17	7,18	7,47	0,01	0,01	0,29
Karangasem	6,32	6,33	6,67	0,01	0,01	0,34
Buleleng	7,24	7,25	7,56	0,16	0,01	0,31
Kota Denpasar	11,47	11,48	11,50	0,24	0,01	0,02
Bali	8,95	9,06	9,39	0,11	0,11	0,33

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). PPP sendiri menggunakan tahun dasar 2012 sebagai harga konstan dan Kota Jakarta Selatan sebagai daerah acuan sehingga PPP antar tahun bisa dibandingkan dengan mengesampingkan faktor perkembangan harga. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita

penduduk Provinsi Bali mencapai Rp 13,94 juta rupiah per tahun, meningkat 122 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sesuai tampilan pada Grafik III.21.

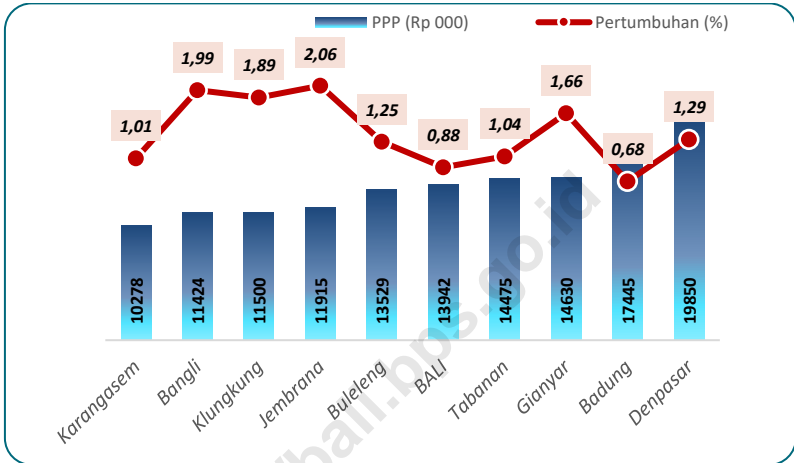
Grafik III. 21
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Bali,
2012 - 2022 (Rp 000)



Kabupaten/kota yang tercatat memiliki pengeluaran per kapita tertinggi pada tahun 2022 adalah Kota Denpasar, dengan besaran mencapai 19,85 juta rupiah. Pengeluaran per kapita Kabupaten Badung menjadi pengeluaran per kapita tertinggi kedua setelah Kota Denpasar dengan besaran mencapai 17,45 juta rupiah, kemudian Kabupaten Gianyar dengan besaran 14,63 juta rupiah dan Kabupaten Tabanan sebesar 14,48 juta rupiah. Sebagai kawasan pusat perekonomian Bali, keempat wilayah tersebut menjadi wilayah dengan penciptaan pendapatan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Bali. Kabupaten yang tercatat dengan pengeluaran per kapita terendah adalah Kabupaten Karangasem dengan capaian sebesar 10,28 juta rupiah.

Grafik III.22

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Per Kabupaten/Kota di Bali dan Pertumbuhannya, 2022



Secara umum, pengeluaran per kapita seluruh kabupaten/kota selama setahun terakhir tercatat mengalami peningkatan. Pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi tercatat di Kabupaten Jembrana yang meningkat 2,06 persen. Setelah Jembrana, Kabupaten Bangli menyusul dengan pertumbuhan 1,99 persen kemudian Kabupaten Klungkung di posisi ketiga dengan pertumbuhan 1,89 persen. Meskipun Bangli dan Klungkung menempati tiga posisi pengeluaran perkapita terendah namun ternyata laju pertumbuhannya di tahun 2022 justru menjadi tiga tertinggi. Peningkatan nilai pengeluaran perkapita terendah tercatat di Kabupaten Badung yaitu 0,68 persen, sedangkan Kota Denpasar meskipun sudah menduduki posisi capaian nominal tertinggi namun tetap tumbuh tinggi diatas satu persen yaitu 1,29 persen.

Tabel III.7

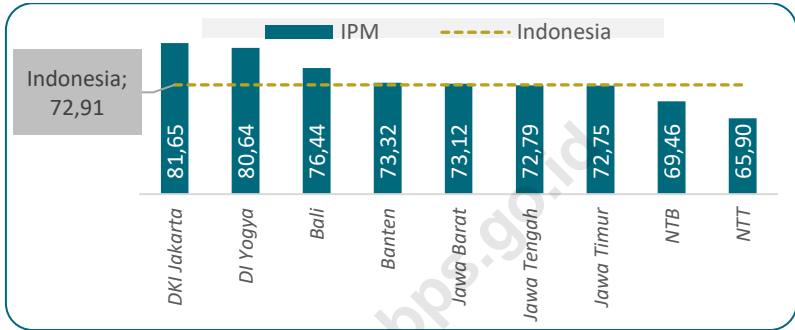
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten/kota di Bali, 2020-2022 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan			Kenaikan		
	2020	2021	2022	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Jembrana	11.790	11.675	11.915	-112	-115	240
Tabanan	14.494	14.326	14.475	-114	-168	149
Badung	17.503	17.327	17.445	-125	-176	118
Gianyar	14.544	14.391	14.630	-79	-153	239
Klungkung	11.376	11.287	11.500	-108	-89	213
Bangli	11.268	11.201	11.424	-101	-67	223
Karangasem	10.237	10.175	10.278	-65	-62	103
Buleleng	13.463	13.362	13.529	-317	-101	167
Kota Denpasar	19.723	19.598	19.850	-269	-125	252
Bali	13.929	13.820	13.942	-217	-109	122

Berdasarkan Tabel III.7 peningkatan pengeluaran per kapita di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp122 ribu. Fenomena ini berbeda dari kondisi selama dua tahun sebelumnya yang tercatat mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp217 ribu dan Rp109 ribu. Indikator ini juga menjadi penanda bahwa sinyal pemulihan ekonomi sudah mulai menggeliat di tahun 2022. Secara nominal, peningkatan tertinggi tercatat di Kota Denpasar dengan besaran 252 ribu rupiah sedangkan terendah di Kabupaten Karangasem yang meningkat hanya 103 ribu rupiah.

Grafik III.23

IPM Beberapa Provinsi di Wilayah Jabalnusra, 2022



Pada tahun 2022, posisi IPM Bali secara nasional tercatat menempati peringkat kelima. IPM Bali tercatat lebih rendah dari IPM DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Di regional JABALNUSRA tercatat dua provinsi masih berada pada kategori “sedang”. Di sisi lain, kesenjangan IPM di regional Bali Nusra masih cukup terasa. Capaian IPM NTT pada tahun 2022 hanya mencapai 65,90 begitupun IPM NTB berada pada nilai 69,46 pada tahun 2022. Kesenjangan tersebut lebih terlihat jika dibandingkan antar wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Perlambatan pertumbuhan wilayah timur dibandingkan wilayah barat mempengaruhi pergerakan IPM pada masa yang akan datang. Jika kondisi ini tetap terjadi selama lima tahun ke depan, angka IPM tersebut cenderung masih akan menempati posisi yang sama dengan tahun 2022.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI
Jl. Raya Puputan, No. 1 Renon, Denpasar
Telp.: (0361) 238159, Fax: (0361) 238162
Email: bps5100@bps.go.id
Homepage: <http://bali.bps.go.id>

